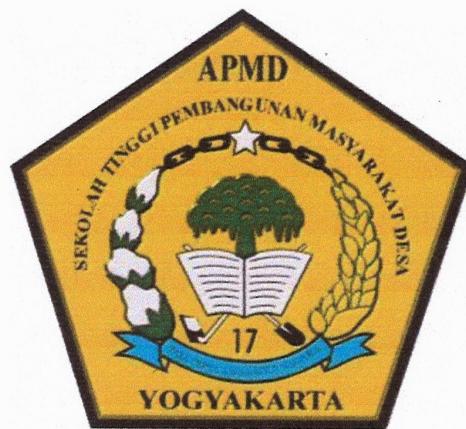


**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENINGKATKAN USAHA**

**MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PADUKUHAN MENGGER**

**KALURAHAN NGLIPAR**



**Disusun Oleh:**

**RINTO KAHA**

**19520090**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2024**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU**

**PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH (UMKM) DI PADUKUHAN MENGGER KALURAHAN NGLIPAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**



**Pendidikan Strata Satu (S1)**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

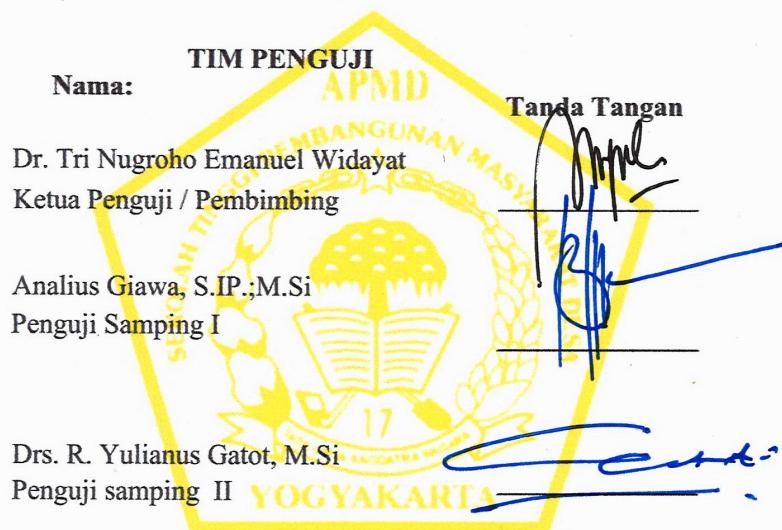
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Pengaji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin

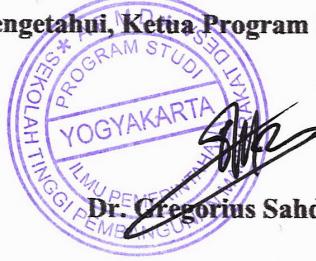
Tanggal : 25 November 2024

Jam : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



Mengetahui, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdian, S.I.P., M.A

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rinto Kaha

Nim : 19520090

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Padukuhan Mengger Kalurahan Nglipar**" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,..... 2024

Yang Membuat Pernyataan



Rinto Kaha  
19520090

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Rinto Kaha  
Nim : 19520090  
Telp : 081326865261  
Email : rintokaha19@gmail.com  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Padukuhan Mengger Kalurahan Nglipar"**

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta



## **MOTTO**

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang

( **Amsal 23:18** )

Tidak ada yang abadi, kita bisa mengubah masa depan

( **Alucard** )

Tidak mengenal diri sendiri, adalah hal yang terburuk

( **Chou** )

Jika kau ingin sampai puncak maka nikmatilah setiap jengkal langkahmu

( **Rinto Kaha** )

Pengalaman itu bukan pada puncaknya akan tetapi pada perjalanannya

( **Rinto Kaha** )

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan karena berkat dan karunia-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar, semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita.

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan Roh Kudus dan rahmat-Nya serta cinta kasihNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua orang tua terkasih, Bapak Soleman Kaha dan Ibu Yuliana Ina Kaka yang telah membesarkan, membimbing serta memberi dukungan dan doa yang tidak berkesudahan yang selalu mengiringi setiap langkahku.
3. Untuk kakak dan adik-adikku: Angriani Kaha, Febrianti Inya Bella dan Arisandy Angga Jappa Ole, yang sangat luar biasa dan yang saya banggakan dalam memberikan dukungan dan doa tanpa henti, yang selama ini sudah menjadi adik terbaik sekaligus sahabat bagi saya, kalian adalah tempat saya berlari dan berteduh ketika saya merasa tidak ada yang memahami diluar rumah.
4. Seluruh keluarga besar yang saya banggakan dan yang saya cintai semoga kesuksesan saya ini dapat membahagiakan kalian.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi Rahmat dan Karunia NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan kewajiban terakhir sebagai mahasiswa untuk melengkapi persyaratan meraih gelar sarjana strata satu melalui penulis skripsi, dengan judul **“Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Padukuhan Mengger Kalurahan Nglipar”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kemudian tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari pihak lain penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai wadah menuntut ilmu;
2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
3. Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat, Selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak ide, kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi penulis;
5. Analius Giawa, S.I.P.;M.Si, selaku dosen penguji samping I sidang skripsi yang telah memberikan banyak ide, kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi penulis;
6. Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si, selaku dosen penguji samping II sidang skripsi yang telah memberikan banyak ide, kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi penulis;
7. Bapak dan ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar, mendidik dan

- membagikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan semoga penulis dapat mengamalkan dan mempergunakan ilmunya dengan baik;
8. Pemerintah Kalurahan Nglipar serta seluruh lapisan masyarakat Padukuhan Mengger, Kalurahan Nglipar, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, DIY.
  9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu atas terselesaiannya skripsi ini.

Yogyakarta, .....2024

Penulis

Rinto Kaha

19520090

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
INTISARI .....	xii
BAB I..PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. <i>Literatur Review</i> .....	11
G. Kerangka Konseptual .....	16
1. Peran Pemerintah Kalurahan.....	16
2. Kewenangan Pemerintah kalurahan .....	27
3. Strategi Meningkatkan UMKM .....	29
H. Metode Penelitian.....	32

BAB II.....PROFIL KALURAHAN DAN UMKM DI PADUKUHAN .....	36
A. Profil Kalurahan Nglipar.....	36
B. Profil Padukuhan Mengger .....	51
C. Profil UMKM Lestari Padukuhan Mengger .....	52
PEMBAHASAN .....	56
A. Peran Pemerintah Kalurahan.....	56
B. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Peran Pemerintah Kalurahan .....	80
BAB IV PENUTUP .....	104
A. KESIMPULAN.....	104
B. SARAN .....	110
DAFTAR PUSTAKA .....	112
LAMPIRAN.....	114

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Daftar Informan .....	32
Tabel 2.1 Luas Wilayah Setiap Padukuhan .....	38
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Penduduk .....	40
Tabel 2.3 Jumlah Berdasarkan Pekerjaan .....	41
Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Penduduk .....	42
Tabel 2.5 Kesenian, Adat dan Budaya .....	45
Tabel 2.6 Pelaku dan Usaha UMKM .....	52

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Struktur Kelompok UMKM Lestari..... 53

## INTISARI

Penelitian ini mengkaji tentang “Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Padukuhan Mengger Kalurahan Nglipar”. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di Padukuhan Mengger, Kalurahan Nglipar, pemerintah kalurahan memiliki peran krusial dalam meningkatkan daya saing di bidang UMKM. Melalui berbagai program dan kebijakan, pemerintah berupaya menciptakan ruang yang mendukung pertumbuhan usaha kecil ini. Salah satu langkah awal yang diambil adalah dengan menyediakan pelatihan, modal usaha dan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Melalui workshop/seminar, para pelaku usaha diberikan pengetahuan tentang manajemen bisnis, pemasaran, dan inovasi produk. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan mereka, tetapi juga membangun kepercayaan diri untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Studi Dokumen. Dimana objek penelitian ini ada Pemerintah Kalurahan Nglipar, pelaku UMKM dan masyarakat dalam meningkatkan UMKM di padukuhan mengger.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya peran pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM seperti: fasilitasi pelatihan, modal awal, kontroling, monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu pemerintah kalurahan sangat dibutuhkan kerja sama yang baik antara satu dengan yang lainnya untuk meningkatkan UMKM Di Padukuhan Mengger, Kalurahan Nglipar. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah kalurahan dan pelaku UMKM dapat membawa dampak positif baik dalam menggunakan/menciptakan sumber daya (potensi) yang dapat meningkatkan UMKM untuk kesejahteraan masyarakat di Padukuhan Mengger, Kalurahan Nglipar.

**Kata Kunci: Peran, Pemerintah Kalurahan, Meningkatkan UMKM.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Kalurahan Nglipar memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya, termasuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam konteks ini, Pemerintah Kalurahan Nglipar harus berperan sebagai fasilitator dan pendukung bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kalurahan Nglipar telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai inisiatif, seperti meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintah Kalurahan Nglipar harus memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pengembangan UMKM. UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama melalui peningkatan pendapatan dan pekerjaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Nglipar harus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan UMKM.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kalurahan Nglipar telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai inisiatif. Salah satu inisiatif yang telah dilakukan adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya lokal. Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya lokal,

Pemerintah Kalurahan Nglipar berharap dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan UMKM yang lebih efektif dan efisien.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah Kalurahan Nglipar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan tersebut adalah bagaimana Pemerintah Kalurahan Nglipar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UMKM. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan UMKM sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Pemerintah Kalurahan Nglipar harus berperan lebih aktif lagi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UMKM. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan UMKM. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, Pemerintah Kalurahan Nglipar berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UMKM.

Selain itu, Pemerintah Kalurahan Nglipar juga harus berperan aktif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya lokal. Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya lokal, Pemerintah Kalurahan Nglipar berharap dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan UMKM yang lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Kalurahan Nglipar juga harus berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan UMKM. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat. Dengan memberikan pelatihan dan bimbingan, Pemerintah Kalurahan Nglipar berharap

dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan UMKM yang lebih efektif dan efisien.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kalurahan Nglipar telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai inisiatif. Salah satu inisiatif yang telah dilakukan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, Pemerintah Kalurahan Nglipar berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah Kalurahan Nglipar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan tersebut adalah bagaimana Pemerintah Kalurahan Nglipar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UMKM, serta bagaimana Pemerintah Kalurahan Nglipar dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya lokal. Oleh karena itu, peran Pemerintah Kalurahan Nglipar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM sangat penting dan harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kalurahan Nglipar telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai inisiatif. Salah satu inisiatif yang telah dilakukan adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya lokal. Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya lokal, Pemerintah Kalurahan Nglipar berharap dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan UMKM yang lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Kalurahan Nglipar juga harus berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan UMKM. Salahsatu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat. Dengan memberikan pelatihan dan bimbingan, Pemerintah Kalurahan Nglipar akan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan UMKM yang lebih efektif dan efisien.

Pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan adanya governance yang efektif dan transparan dalam pengelolaan UMKM. Governance yang baik dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi korupsi, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam konteks ini, NGLIPAR (*Nasional Governance and Leadership Institute for Public Administration and Regional Development*) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM. NGLIPAR berfokus pada pengembangan kapasitas dan kemampuan pemerintahan daerah, serta meningkatkan kualitas pengelolaan UMKM. Dengan demikian, NGLIPAR dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan pemerintahan daerah dalam mengelola UMKM, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan UMKM yang lebih efektif dan efisien.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami kemajuan dalam pengembangan UMKM, namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangan utama adalah meningkatkan kualitas pengelolaan UMKM, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan UMKM. Dalam hal ini, Kalurahan Nglipar dapat berperan sebagai agen perubahan yang membantu meningkatkan kualitas pengelolaan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, peran pemerintah nglipar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM sangat penting dan strategis. Pemerintah Nglipar dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan UMKM, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kesadaran dan kemampuan pemerintahan daerah dalam mengelola UMKM. Dengan demikian, Kalurahan Nglipar dapat berkontribusi pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kalurahan Nglipar adalah salah satu wilayah yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, DIY, memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM telah dikenal sebagai salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Dengan demikian, peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Nglipar perlu dipahami dan dikembangkan lebih lanjut.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Nglipar tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal. UMKM dapat berperan sebagai motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Nglipar dengan cara mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal.

Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang menghambat pengembangan UMKM di Kalurahan Nglipar, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan UMKM, kurangnya dukungan pemerintah, serta kurangnya akses ke sumber daya dan teknologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan dukungan pemerintah, serta meningkatkan akses ke sumber daya dan teknologi.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana UMKM dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Nglipar. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menghambat pengembangan UMKM di Kalurahan Nglipar dan bagaimana hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan UMKM di Kalurahan Nglipar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah kemajuan yang dilakukan secara sadar dan terarah serta ada keterkaitan dalam semua aspek. Pembangunan merupakan lanjutan dari usaha-usaha peningkatan yang dicapai sebelumnya serta melanjutkan apa yang belum dilaksanakan. Pembangunan Masyarakat di desa-desa berkembang tentunya bisa sangat di pengaruhi oleh keberadaan dari UMKM, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah lapangan kerja, yang juga tentunya meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Keberadaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan bagian terbesar dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membantu pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di kalurahan Nglipar.

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sudah dijelaskan secara ringkas mengenai apa itu UMKM. Mulai dari usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Menengah

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kegiatan UMKM adalah salah satu dari usaha masyarakat untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat itu sendiri, dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, dengan demikian Masyarakat akan lebih sejahtera. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan kerja yang ada. Di padukuhan Mengger sendiri terdapat sekitarbelasan UMKM yang di antaranya ada beberapa yang menyerap pekerja dari masyarakat padukuhan Mengger itu sendiri, hal ini tentunya dapat meminimalisir jumlah pengangguran dan tentunya meningkatkan taraf hidup dari masyarakat padukuhan mengger. UMKM di padukuhan Mengger sendiri terdiri dari berbagai jenis UMKM di antaranya yang terbesar adalah UMKM yang berjalan di bidang penjualan makanan yaitu bakpia dan pabrik tempe. Kedua UMKM tersebut adalah yang paling banyak menyerap pekerja.

Pada saat ini perkembangan usaha kecil sangat pesat di masyarakat, seiring kemajuan teknologi dan permintaan pasar yang besar pada jenis-jenis barang tertentu. Lebih dari itu pengembangannya mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan yang struktural dan dapat memberikan peran pada lingkungan sekitar

yang dapat menciptakan kesejahteraan. Indonesia adalah salah satu negara yang penuh dengan kekayaan alam, yang setiap potensi yang ada belum mampu dimaksimalkan. Masyarakat lebih dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada diri sendiri maupun yang ada di wilayah masing-masing sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi, hal inilah yang mendasari Masyarakat harus lebih inovatif dan kreatif dalam menjalankan UMKM. Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat di artikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang. Tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

Bagaimana Peran Pemerintah Kalurahan dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Padukuhan Mengger Kalurahan Nglipar.

## **C. Fokus Penelitian**

1. Peran Pemerintah Kalurahan Nglipar dalam Meningkatkan UMKM di Padukuhan Mengger.
2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Peran Pemerintah Kalurahan Nglipar dalam Meningkatkan UMKM di Padukuhan Mengger.

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kalurahan Nglipar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM.

Khususnya, penelitian ini akan fokus pada bagaimana Pemerintah Kalurahan Nglipar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UMKM, serta bagaimana Pemerintah Kalurahan Nglipar dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya lokal. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Padukuhan Mengger Kalurahan Nglipar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran Pemerintah Kalurahan dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Padukuhan Mengger Kalurahan Nglipar.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya dalam bidang pemerintahan desa.

### 2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Padukuhan Mengger sebagai tolak ukur dalam proses peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui UMKM.

### 3. Manfaat bagi penulis

Melatih kemampuan berpikir dalam berinovasi dan berkreativitas Ketika berada di tengah Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan UMKM di Kalurahan Nglipar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil

penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi Pemerintah Kalurahan Nglipar dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan akses masyarakat terhadap sumber daya lokal.

#### F. *Literatur Review*

Beberapa hasil penelitian dari peneliti lain tentang tema sebidang sebagai berikut:

1. Penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Kepemimpinan Stratejik, dan Karakter Umum UMKM Terhadap Strategi Bisnis dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Nasabah PT. Bank BRI,Tbk Kanca Purwodadi. Dilakukan oleh I Wayan Suparta, Universitas Diponegoro Semarang, Jurnal Bisnis Strategi,Volume 20 Nomor 2, Tahun 2011. Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh kepemimpinan stratejik dan karakteristik UMKM terhadap strategi bisnis UMKM dalam meningkatkan kinerja UMKM. Sampel penelitian ini adalah UMKM yang menjadi nasabah PT. BRI (persero) Tbk. Cabang Purwodadi, sejumlah 150 responden. *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dijalankan dengan perangkat lunak AMOS, digunakan untuk menganalisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan stratejik dan karakteristik UMKM berpengaruh positif terhadap strategi bisnis UMKM dalam meningkatkan kinerja UMKM. Temuan empiris tersebut mengindikasikan bahwa kepemimpinan stratejik berpengaruh signifikan terhadap strategi bisnis UMKM dengan nilai regresi sebesar 0,24; karakteristik UMKM berpengaruh signifikan terhadap strategi bisnis UMKM dengan nilai regresi sebesar 0,25; dan strategi bisnis UMKM berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM dengan nilai

regressi sebesar 0,30. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian kredit kepada UMKM di masa yang akan datang, yaitu dengan memperhatikan faktor kepemimpinan strategik dan karakter UMKM dalam mengembangkan strategi bisnisnya.

2. Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Usaha dan Penggunaan Informasi Terhadap Kinerja Pengambilan Keputusan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan (Survey pada UMKM di Cimahi), Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 15 No. 3 November 2013, Heni Nurani, Elis Dwiana, dan Euie Eti Fakultas Ekonomi UNJANI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kepemimpinan, motivasi usaha, dan pemanfaatan informasi, terhadap kinerja pengambilan keputusan dan dampaknya terhadap kinerja usaha baik secara parsial maupun secara simultan UMKMdi Kota Cimahi. Penelitian dilakukan pada 96 UMKM di bawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan menyebar kuesioner kepada para pengelola/pemilik UMKM. Tehnik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengelola/pemilik UMKM. Analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kepemimpinan, motivasi dan penggunaan informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengambilan keputusan. Demikian pula, kinerja pengambilan keputusan berdampak signifikan terhadap kinerja usaha. Ditemukan fakta bahwa masih diperlukan peningkatan pengetahuan ataupun pelatihan pengelolaan usaha dan pemanfaatan informasi dan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usaha. (Sumber: Nurani, H.,

Dwiana, E., & Eti, E. (2013). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Usaha Dan Penggunaan Informasi Terhadap Kinerja Pengambilan Keputusan Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan (Survey Pada UMKM Di Cimahi). *Journal of Social Sciences and Humanities*, 15(3).)

3. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengembangkan UMKM Desa Karya Mulya, Jurnal Management dan Bisnis Kreatif, Volume 8 No :1/2022, Nandang, Wanta, Renga Madya Pranata Program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengidentifikasi peran kepemimpinan dari Kepala Desa dalam mengembangkan UMKM. Lokasi penelitian ini di Desa Karya Mulya Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat.

Sedangkan pengumpulan data melalui data primer hasil wawancara dan observasi serta data sekunder dari berbagai literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi sumber yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian tentang peran kepemimpinan Kepala Desa dalam mengembangkan UMKM desa Karya Mulya yaitu:

- a) Kemampuan kepala desa dalam membuat keputusan sangat baik,
- b) Kemampuan memotivasi yang dimiliki oleh kepala desa baik,
- c) Kemampuan komunikasi kepala desa sangat baik,
- d) Kemampuan kepala desa dalam mengendalikan bawahan baik,

e) Kepala desa dalam mengemban tugas sangat bertanggung jawab atau sangat baik, serta

f) Kemampuan kepala desa dalam mengendalikan emosi baik.

4. Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengembangan UMKM Wisata Panci di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 2 No. 02, Maret (2022) e-ISSN: 2797-04692, Fara Dina Zachrawan Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kepala desa memiliki peran penting dalam proses kepemimpinannya. Salah satunya adalah pengembangan UMKM dan pariwisata yang ada di dalam desa tersebut.

UMKM mempunyai peranan penting untuk penanggulangan kemiskinan, karena UMKM memiliki peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Kecamatan Pandaan khususnya Desa Karangjati memiliki SDM yang potensial dan menarik untuk dilatih dan dikembangkan sebagai tujuan wisata UMKM. Merujuk pada teori perilaku kepemimpinan. Di dalam teori ini di paparkan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang baik dan efektif, pemimpin yang dapat mendeklegasikan tugasnya serta dapat berkomunikasi dan memotivasi para anggotanya. Dariteori ini, seseorang dapat belajar untuk melatih diri menjadi seorang pemimpin yang efektif, tidak tergantung pada sifat yang ada pada dirinya. Kepala desa dalam menyikapi berkembangnya UMKM pangi ini dirasa cukup tanggap, yang mana kepala desa Karang jari berperan sebagai mobilisator yang mana mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan dan perkembangan perekonomian desa melalui UMKM ini secara

gotong royong. (Sumber:Zachrawan,F. D., & Indartuti, E. (2022). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan UMKM Wisata Panci Di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 2(02), 77-82.)

5. Hubungan Peran Pemimpin dengan Keberhasilan Usaha Budidaya Ikan Hias, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Vol 5 No 1, tahun 2021, Aini Suryati Institut Pertanian Bogor. Kepemimpinan merupakan faktor utama yang mampu mengorganisasikan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Peran pemimpin dalam sebuah kelompok usaha mempunyai pengaruh yang sangat besar jika pemimpin berhasil menjalankan perannya dengan baik. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Budidaya ikan hias di Desa Ciherang merupakan salah satu UMKM yang telah memiliki prestasi dalam pengembangan usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan peran pemimpin dengan keberhasilan usaha budidaya ikan hias di Desa Ciherang,Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Data dianalisis menggunakan tabel frekuensi dan uji korelasi Rank Spearman untuk mengetahui hubungan pada kedua variabel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel peran pemimpin dengan keberhasilan usaha. Namun jika dilihat dari indikator peran pemimpin, terdapat dua indikator yang berhubungan signifikan dengan keberhasilan usaha, yakni peran pemimpin dalam memfasilitasi tercapainya tujuan dan peran pemimpin dalam menampung aspirasi anggotanya. (Sumber: Zuryati, A., & Barlan, Z. A. (2021). Hubungan Peran Pemimpin Dengan

Keberhasilan Usaha Budidaya Ikan Hias. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(1), 134-149.)

Berdasarkan *literatur review* yang diperolah dari beberapa jurnal yang telah dibaca disimpulkan bahwa penulis memiliki kesamaan tentang membahas mengenai aspek kognitif dari seorang pemimpin dapat memberi pengaruh positif dalam pengembangan UMKM. Sedangkan perbedaannya terletak pada seberapa besar dampak yang dihasilkan dalam perkembangan UMKM. Ada yang membahas mengenai karakteristik sebuah UMKM mempengaruhi dampak yang dihasilkan ada juga yang membahas mengenai relasi antara pemimpin dan sebuah UMKM mempengaruhi dampak perkembangan UMKM.

## G. Kerangka Konseptual

### 1. Peran Pemerintah Kalurahan

#### a. Pengertian peran

Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyelesaikan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di dunia pekerjaan maupun diluar pekerjaannya.

Dalam menjalankan kehidupan sosialnya, setiap manusia baik secara individu, kelembagaan, dan sistem memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam melakukan sesuatu. Setiap manusia memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan perannya yang dipengaruhi oleh arah belakang kehidupan sosial masing-masing.

Berdasarkan dengan peranan di atas, hal ini sampaikan oleh Heroeputri dan Santoso dengan mengemukakan lima (5) dimensi Peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai sebuah strategi. Peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran digunakan sebagai sebuah alat untuk memperoleh masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pendapat ini dilandaskan oleh sebuah pemikiran bahwa pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat dinilai sebagai masukan untuk mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran dimanfaatkan sebagai suatu strategi dalam mengurangi dan meredam konflik melalui upaya pencapaian mufakat berdasarkan pendapat-pendapat yang diterima. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah proses bertukar pikiran dan pandangan yang disampaikan dapat meningkatkan pemahaman serta menghindari ketidakpercayaan dan kerancuan.
- 5) Peran sebagai sebuah terapi. Dalam persepsi ini, peran dilaksanakan sebagai usaha untuk mengobati masalah psikologis masyarakat seperti ketidakberdayaan, tidak percaya diri serta anggapan bahwa mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Dari lima pendapat tentang peran di atas dapat dikatakan bahwa mengenai peran ini sangat dibutuhkan dalam dunia untuk menjalankan kehidupannya sebagai manusia sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Seseorang dikatakan berperan apabila seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya, artinya peranan menentukan apa yang harus diperbuat oleh masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa saja yang diberikan masyarakat kepada seseorang, peranan sangat penting dalam kehidupan, karena peranan dapat mengatur perilaku seseorang. (Rahawarin, Y. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(63).

Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Artinya peranan merupakan

serangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat dalam sebuah organisasi.
  - c) Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aktivitas, perilaku atau tindakan yang dilakukan atau dijalankan oleh seorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang memiliki status atau kedudukan yang dapat mempengaruhi sekelompok orang atau lingkungan sesuai dengan apa yang diharapkan
- b. Peran pemerintah kalurahan sebagai fasilitator, inovator, dinamisator, organisator, dan regulator.
- 1) Peran sebagai fasilitator
- Peran pemerintah sebagai fasilitator upaya menjamin dan memfasilitasi UMKM dengan pihak luar agar dapat mengembangkan usaha yang mereka miliki. Bentuk pemberian fasilitas pemerintah kalurahan kepada UMKM dapat berupa subsidi barang atau jasa, keringanan atau kemudahan dalam mengurus perijinan, aturan dan berkas-berkas usaha, menfasilitasi tempat usaha, serta mendatangkan pihak-pihak luar yang dapat membantu atau membina para pelaku UMKM agar lebih sukses dan maju. Dalam hal ini untuk melihat peran pemerintah sebagai fasilitator yang dilakukan oleh Kalurahan Nglipar

untuk mendukung UMKM yang ada supaya menjadi lebih maju dan sukses.

2) Peran sebagai inovator

Peran pemerintah kalurahan sebagai inovator, berarti pemerintah kalurahan secara keseluruhan bisa menjadi sumber-sumber ide baru terutama yang berhubungan berbagai kegiatan UMKM agar lebih efektif dan mempercepat proses pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan. Inovatif mencakup pengembangan gagasan baru, pemikiran baru dan mengembangkan serta menerapkan gagasan baru tersebut dalam pekerjaan.

Dalam jurnal yang di tulis oleh Sari, T. A., & Priyanti, E. (2022) peranan sebagai Inovator pemerintah kalurahan bisa berupa tindakan yang dilakukan dalam hal:

- a) Merancang dan menerapkan sumber ide baru dalam pemberdayaan kalurahan, dimana pemerintah kalurahan menjadi sumber ide, sumber saran dan sumber pendapat tentang keputusan yang akan diambil di samping sebagai pelaksana keputusan yang telah diambil.
- b) Kepala Lurah dalam mengambil keputusan sendiri tetap berkomunikasi dengan ketua BPD, terkait pemberdayaan fisik (penggunaan dana desa) maka didiskusikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) RPJMD dirangkum lalu didiskusikan dengan mengundang masyarakat, tokoh masyarakat,

tokoh pemuda dalam hal ini lebih khusus pelaku UMKM.

Menciptakan, memperkenalkan dan menerapkan sistem, prosedur dan metode kerja baru dalam penyelesaian tugas maupun masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan, artinya dalam penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi pemerintah kalurahan Nglipar dalam hal ini terlebih dahulu meneliti dan mendiagnosis sumber-sumber atau sebab timbulnya suatu permasalahan dan memecahkan masalah atau mencari jalan keluarnya dengan menggunakan rasio dan pendekatan yang bersifat ilmiah serta praktis sesuai dengan kemampuan pemerintah kalurahan Nglipar sehingga nilai-sosial yang dapat ditinggalkan dan memberikan jalan kepada norma-norma sosial yang sesuai dengan tuntutan dizaman yang terus berkembang ini, cara kerja lebih sederhana, efektif dan efisien namun mampu memecahkan masalah yang dihadapi ini yang sangat diperlukan.

### 3) Peran sebagai dinamisator

Peran pemerintah kalurahan sebagai dinamisator adalah menggerakkan keterlibatan masyarakat apabila terjadi hambatan dalam proses pemberdayaan dibidang UMKM. Sebagai penggerak,pemerintah kalurahan berkontribusi dengan memberikan bimbingan atau arahan yang luas dan efektif kepada masyarakat, dan hal tersebut membutuhkan pengarahan serta bimbingan atau pedoman. Pemerintah kalurahan

memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat atau pelaku UMKM melalui tim penyuluhan dan organisasi tertentu.

4) Peran sebagai organisator

Sebagai pemimpin dalam pemerintahan kalurahan perlu adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan dalam proses pemberdayaan kalurahan pun begitu terkait dengan peran perangkat kalurahan sebagai organisator. Peran pemerintah kalurahan sebagai Organisator dimana berhubungan dengan tindakan pemerintah kalurahan antara satu dengan yang lain dalam mengorganisasi semua aktor yang terlibat dalam pemerintahan dan pemberdayaan kalurahan dengan melakukan pemberdayaan. Diukur dengan indikator yaitu: Kejelasan kerja perangkat pemerintah kalurahan dengan yang lain serta adanya hubungan yang efesien dalam bekerjasama dan koordinasi yang baik antara perangkat pemerintah yang satu dengan perangkat pemerintah kalurahan lainnya.

5) Peran sebagai regulator

Peran pemerintah menjadi regulator merupakan pemerintah dalam mempersiapkan arah menjadi penyeimbang penyelenggaraan pembangunan dengan menghasilkan atau menciptakan suatu peraturan atau kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi pembangunan

Pada penelitian ini, fungsi regulator dalam menentukan peraturan dan kebijakan guna mendukung jalannya proses peningkatan dan

pemberdayaan dibidang UMKM.

Nurdin (2014), mengemukakan beberapa indikator peran pemerintah sebagai regulator yaitu sebagai berikut:

- 1) Peran pemerintah dalam membuat kebijakan dalam pemberdayaan: Berperan dalam membuat kebijakan dalam pemberdayaan
- 2) Kemampuan pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan
- 3) Peran pemerintah untuk mengatasi masalah
- 4) Peran pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari sebelumnya.

c. Pemerintah Kalurahan

Kata pemerintahan dan pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Kedua dapat kita bedakan yakni pemerintah dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas.

Menurut Muhammad Yamin (1982) Pemerintah ialah jabatan atau aparatur dan kalau dalam tingakat pemerintah kalurahan di sebut perangkat kalurahan dalam susunan politik.

Pemerintah juga dapat di artikan sebagai organisasi yang sudah terbentuk yang saling bekerja sama dan menjalankan tugas dan fungsinya

untuk mengelola sistem pemerintahan serta menetapkan kebijakan-kebijakan dalam mencapai tujuan bersama.

Pemerintah kalurahan adalah penyelenggara pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah di tingkat Kalurahan. Pemerintah kalurahan sebagai fasilitator mulai dari merumuskan, menyiapkan, melaksanakan, mengontrol hingga evaluasi dalam menjaga dan melindungi, mengembangkan setiap proram yang di laksanakan dalam kalurahan itu sendiri.

Pemerintah Kalurahan adalah Lurah di bantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. Perda Kabupaten Gunung Kidul No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan.

Dalam jurnal yang di tulis oleh Kusbeli, R (2021:7) mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, kalurahan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kalurahan
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 3) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kalurahan
- 4) Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertibanwilayah
- 5) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kalurahan
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kalurahan
- 7) Penyusunan dan singkronisasi usulan program dan kegiatan

kemasyarakatan

8) Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat

9) Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jadi pemerintah kalurahan merupakan bagian penyelenggara desa yang mengatur wilayahnya sendiri dan bukan dari pemerintah lain. Pemerintah Kalurahan hanya sibuk mengurus wilayahnya sendiri dan memenuhi kewenangannya. Sehingga siapapun yang masuk dalam pemerintah Kalurahan harus melaksanakan tugasnya secara efesien, akuntabel demi kepentingan masyarakat setempat.

Dalam arti luas pemerintah berarti lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif dengan segala fungsi dan kewenangannya. Sedangkan secara etimologi pemerintah berasal dari kata perintah yang dapat diartikan sebagai: 1) Perintah yaitu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. 2) Pemerintah yaitu kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara). 3) Pemerintah yaitu perbuatan (cara, halurusan dan sebagainya) memerintah.

#### d. Fungsi Pemerintahan

Menurut Nurul Aini (2004) secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan, baik pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah, adapun tiga fungsi tersebut yaitu sebagai berikut:

### 1) Fungsi Pemerintahan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh pemerintah daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah.

### 2) Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter dan peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public Service*) dan Pelayanan sipil (*Civil Service*) yang menghargai kesataraan.

### 3) Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna

melaksanakan urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dilakukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan pemerintah daerah.

Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktivitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan, dan segala kepentingan-kepentingan masyarakat diperhatikan baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata suatu pemerintah.

## **2. Kewenangan Pemerintah kalurahan**

Kewenangan Kalurahan adalah: suatu tindakan yang dapat dilakukan sebagai pemerintah kalurahan dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam hal ini pemerintah kalurahan menjalankan program-program berdasarkan kewenangannya sebagaimana yang sudah ditentukan baik yang berasal dari pusat maupun tingkat daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Pasal 3 meliputi: a) penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) Pelaksanaan Pembangunan Desa; c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan d) Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta pasal 6 tentang jenis kewenangan desa meliputi: a) kewenangan berdasarkan hal asal usul; b) kewenangan lokal berskala desa; c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi. Atau pemerintah daerah kabupaten/kota; d) dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam diatur dan diurus oleh Desa.

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa. Dilanjutkan dengan ayat (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Penugasan disertai biaya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Pasal 3 meliputi: a) penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) Pelaksanaan Pembangunan Desa; c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan d)

Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta pasal6 tentang jenis kewenangan desa meliputi:

a) kewenangan berdasarkan hal asal usul; b) kewenangan lokal berskala desa; c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi. Atau pemerintah daerah kabupaten/kota; d) dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan.

Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Administrasi Pemerintahan Kalurahan pasal 2 ayat (1) Lurah berwenang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Kalurahan. (2) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka: a) Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; b) Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan; c) Pembinaan Kemasyarakatan; dan d) Pemberdayaan Masyarakat. (3) Dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah didukung oleh Pamong Kalurahan.

Dari penjelasan tentang kewenangan pemerintah kalurahan berdasarkan UU Desa, Permedagri, dan Perbup Kabupaten Gunung Kidul, DIY bahwa memang sudah ditentukan yang menjadi kewenangan kalurahansupaya memudahkan dalam menjalankan roda pemerintah dan sebagai pemerintah kalurahan tinggal bagaimana mereka menjalakannya dalam bentuk program kerja yang kemudian akan di pertanggung jawabkan ke pemerintah atasannya.

### **3. Strategi Meningkatkan UMKM**

Berdasarkan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM merupakan kegiatan usaha yang

mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Dalam artikel yang diulis oleh Team Amarta Blog (2023) bahwa ada enam (6) strategi untuk mengatasi problem dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:

a) Kredit Bunga Rendah.

Strategi pertama yang perlu dilakukan sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro adalah menyediakan kredit dengan tingkat bunga rendah bagi pelaku UMKM. Dengan harapan, adanya pemberdayaan UMKM melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat) memudahkan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebab, mereka bisa mendapat suntikan modal dengan bunga yang terjangkau.

b) Memperluas Jejaring Pemasaran.

Strategi yang kedua adalah melebarkan sayap bisnis dengan cara memperluas jaringan pemasaran. Jika biasanya pemasaran hanya dilakukan dari mulut ke mulut. Maka, kini saatnya pelaku UMKM mulai melirik pemasaran digital. Dengan cara ini, target pasar yang dituju tidak hanya sebatas satu wilayah saja, tapi bisa meluas hingga keluar negeri.

c) Memperbaiki Kualitas SDM.

Selain memperluas jaringan, pelaku UMKM juga perlu memperbaiki kualitas SDM yang dimilikinya. Dengan demikian, setiap pelaku UMKM akan mampu meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas yang berujung

pada meningkatnya keuntungan.

d) Menerapkan Teknologi Tepat Guna.

Strategi keempat yang penting bagi pemberdayaan usaha mikro adalah dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna atau TTG. Jika hal ini diterapkan secara maksimal, bukan tidak mungkin akan hadir berbagai nilai positif yang menguntungkan bagi UMKM. Contohnya, adanya peningkatan dalam hal pendapatan, adanya nilai tambah produk, menghadirkan perbaikan mutu, serta melahirkan sebuah usaha produktif yang lebih efisien.

e) Menciptakan Iklum Usaha Kondusif.

Upaya berikutnya dalam rangka pemberdayaan UMKM adalah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing sekaligus meningkatkan pelayanan perizinan yang terbaik bagi masyarakat.

f) Menyediakan Sarana Dan Prasarana Yang Memadai.

Strategi yang terakhir adalah menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses kegiatan usaha agar tujuan bersama bisa cepat tercapai.

Dari enam (6) poin tentang strategi peningkatan UMKM di atas dengan berbagai macam pengertiannya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan UMKM diperlukan yaitu: kredit bungan rendah, memperluas jejaring pemasaran, memperbaiki kualitas SDM, menerapkan teknologi tepat guna, menciptakan iklim usaha kondusif, dan menyediakan

sarana dan prasarana yang memadai untuk keberlanjutan UMKM.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. dalam penelitian ini, kepemimpinan kepala desa sangat mempengaruhi pengembangan UMKM,sebagaimana yang diketahui kepala desa yang tidak mumpuni dapat menghambat pengembangan UMKM, seorang kepala desa haruslah mampu membangun komunikasi,mampu mengembangkan team, mampu menggerakan team sesuai posisinya masing-masing,mampu berkomunikasi dengan baik,mampu membaca dan menilai peluang, mengetahui kelemahan dan kelebihan organisasi,mampu membuat rencana strategis mampumembangun mitra kerja,mampu mengembangkan orang yang dipimpin serta mampu mengontrol situasi dan kondisi agar lebih kondusif.

### **2. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek atau objek penelitian. Dalam pengertian yang lain, Unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan focus atau komponen yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan Kepala desa dalam pengembangan UMKM.

#### **a. Teknik Penentuan Informan**

Menurut Sugiyono (2010) berpendapat bahwa teknik purpose

merupakan teknik pengambilan data dengan menentukan subyek penelitian yang sudah di pertimbangkan. Dari penjelasan tersebut sejalan dengan apa di katakana oleh Arikunto (2006) yang mengatakan bahwa purpose sampling merupakan teknik pengimpulan data dengan berdasarkan pertimbangan tertentu bukan secara acara untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pengertian di atas tentang purpose adalah teknik/cara mengambil data yang relevan dengan pertimbangan dan keputusan yang dibuat oleh peneliti. Dalam proses pengambilan data bisa secara acak atau juga bisa berurutan (bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas).

Dalam pengambilan data peneliti telah mewawancara informan, yang kemudian data yang diperoleh dari informan telah kaji oleh peneliti.

Ada beberapa narasumber yang telah di wawancara peneliti Kalurahan Nglipar, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Umur (Tahun)	L/P	Pendidikan
1.	Samsuri	Lurah	51	L	S.Pd
2.	Agung Murdianto	Carik	33	L	S.E
3.	Andri Yunaita	Dukuh Padukuhan mengger	38	P	SMA
4.	Muhammad Affan	Pengurus digital marketing UMKM	18	L	SMA
5.	Nurhidayati	Pengurus lembaga UMKM	38	P	SMK
6.	Muhammad Alim Wahyudi	Karang taruna	25	L	S.AP.
7.	Suryanti	Pelaku UMKM	53	P	SMP
8.	Basuki Purnomo	Pelaku UMKM	49	L	SMP
9.	Puji Lestari	Pelaku UMKM	46	P	SLTA
10.	Muji Lestari	Pengurus lembaga UMKM	38	P	SMA
11.	Yuni Ertiana	Pengurus lembaga UMKM	32	P	SMK
12.	Wahyu tus vita	Pelaku UMKM	34	P	SLTA

13.	Agus Supardi	Tokoh Masyarakat	53	L	SD
14.	Dwi Suwarsini	Tokoh Masyarakat	45	P	SLTA

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2024

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Observasi

Burhan (2011:110). Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan keseharian dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Dalam menentukan hal-hal yang hendak diamati, pengamat telah mengamati masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian melakukan pengamatan kegiatan yang dilakukan subjek penelitian.

##### b) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang terjadi secara langsung antara dua orang atau lebih. Pewawancara biasa disebut dengan interviewer sementara orang yang akan diwawancarai akan disebut dinamakan narasumber atau informan. Selain itu, ada yang mendefinisikan wawancara yaitu ialah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau wawancara jarak jauh.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah Kumpulan dari dokumen-dokumen dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarluaskan kepada pemakai informasi tersebut.

Menurut Encyclopedia Britanica (Manis,2017) dokumentasi ialah semacam pengawasan dan penyusunan bibliografi yang menggunakan alat-alat seperti indeks, sari karangan dan isi bibliografi disamping memakai cara yang tradisional “klasik dankatalogis”, untuk membuat informasi dapat dicapai.

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono 2017:335) menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan merencanakan secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun bagian data kedalam kategori, menjabarkan ke bagianterkecil, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting yang dapat di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga bias mudah di pahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN DAN UMKM DI PADUKUHAN**

#### **A. Profil Kalurahan Nglipar**

Kalurahan Nglipar merupakan kalurahan perkotaan di wilayah Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi perputaran ekonomi masyarakat luas dengan didukung adanya Pasar Negeri, jalur transportasi antar Kapanewon, banyaknya pelaku bisnis jasa dan pedagang kecil lokal dari luar wilayah Kalurahan Nglipar serta keberadaan Badan Usaha Milik Kalurahan yang telah memiliki beberapa embrio penopang ekonomi rakyat.

##### **1. Posisi dan Bentuk Wilayah**

Kalurahan Nglipar terletak di 11 Km sebelah utara dari pusat Pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul dengan ketinggian ± 200 km di atas permukaan laut.

Bentuk Wilayah :

- a) Datar sampai berombak : 80 %
- b) Berombak sampai berbukit : 20 %
- c) Berbukit sampai bergunung : 0 %

##### **2. Pembagian Wilayah**

Secara Administrasi terbagi menjadi 6 Wilayah Padukuhan yang terdiri dari 6 RW dan 38 RT.

- a) Padukuhan Sumberejo : RW 1 Terdiri dari 4 RT
- b) Padukuhan Mengger : RW 2 Terdiri dari 8 RT
- c) Padukuhan Nglipar Lor : RW 3 Terdiri dari 8 RT
- d) Padukuhan Nglipar Kidul : RW 4 Terdiri dari 6 RT

e) Padukuhan Ngaliyan : RW 5 Terdiri dari 9 RT

f) Padukuhan Kedungranting : RW 6 Terdiri dari 3 RT

3. Panjang Jalan :

a). Jalan Aspal : 7.686 m

b). Jalan Cor Rabat : 20.746 m

c). Jalan Batu/tanah : 20.689 m

4. Batas Wilayah :

Sebelah Utara : Kalurahan Kedungpoh

Sebelah Timur : Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo

Sebelah Selatan : Kalurahan Kedungkeris

Sebelah Barat : Kalurahan Pengkol

## 5. Luas Wilayah

Tabel 2.1 Luas Wilayah Setiap Padukuhan

No.	Padukuhan	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Bukan Sawah			Hutan Negara (Ha)	Hutan Negara Ditanami Padi (Ha)	Hutan Rakyat (Ha)	Lain-lain (Ha)	Jumlah Total (Ha)	Ket.						
			Luas Tegal		Pekarangan (Ha)												
			Luas Tegal (Ha)	Ditanami Padi (Ha)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	SUMBEREJO	0,0000	23,0110	15,0000	30,3960	156,0000	10,0000	26,3300	11,6850	235,7370	Lahan Hutan Rakyat terdiri dari Tegal dan Pekarangan						
2	MENGER	0,0000	47,3090	25,0000	35,0100	176,0000	150,0000	33,4850	11,8700	291,8040							
3	NGLIPAR LOR	0,0000	27,3960	20,0000	30,0000	0,0000	0,0000	34,5610	19,3510	91,9570							
4	NGLIPAR KIDUL	0,0000	42,0060	35,0000	29,0890	235,0000	65,0000	37,4450	17,2125	343,5400							
5	NGALIYAN	0,0000	57,1350	45,0000	32,3875	56,0000	27,0000	38,2560	12,6405	183,7785							
6	KEDUNGRANTI	0,0000	30,3875	20,0000	20,8110	157,0000	40,0000	12,7560	13,5035	220,9545							
Jumlah		0,0000	227,2445	160,0000	177,6935	780,0000	292,0000	182,8330	86,2625	1367,7710							

Sumber: Data Profil Kalurahan Nglipar 2023

## 6. Demografi

Dalam rangka menopang keberlangsungan kemajuan Kalurahan Nglipar, utamanya didukung oleh statistik kependudukan yang secara rinci dan komunitas terbagi menjadi beberapa kelompok, baik dari segi gender, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. Sebagai gambaran tingkat perkembangan penduduk atau Sumber Daya Manusia yang tersedia di wialyah Kalurahan Nglipar adalah sebagai berikut :

### a. Penduduk

- 1) Jumlah penduduk : 4.508 Jiwa
- 2) Penduduk Laki-laki : 2.421 Jiwa
- 3) Penduduk Perempuan : 2.087 Jiwa
- 4) Jumlah kepala keluarga : 1.358 Jiwa
- 5) KK Laki-laki : 1.145 Jiwa
- 6) KK Perempuan : 213 Jiwa

### b. Kelompok umur

- 1) 0-5 Tahun : 118 Jiwa
  - Laki-laki : 56 Jiwa
  - Perempuan : 62 Jiwa
- 2) 6-18 Tahun : 684 Jiwa
  - Laki-laki : 342 Jiwa
  - Perempuan : 342 Jiwa
- 3) 19-40 Tahun : 3.382 Jiwa
  - Laki-laki : 716 Jiwa

Perempuan	:	666 Jiwa
4) 41-75 Tahun	:	1.904 Jiwa
Laki-laki	:	1.028 Jiwa
Perempuan	:	279 Jiwa
5) 76-90 Tahun	:	420 Jiwa
Laki-laki	:	279 Jiwa
Perempuan	:	141 Jiwa

c. Rasio

- 1) Produktif : 3.018 Jiwa
- 2) Anak : 882 Jiwa
- 3) Tua : 608 Jiwa

d. Tingkat Pendidikan Penduduk

Basis pendidikan penduduk di Kalurahan Nglipar rata-rata masih rendah sehingga secara umum untuk berusaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya masih sangat lamban, terlebih untuk membangun wilayah secara fisik.

Tabel 2.2  
Tingkat Pendidikan Penduduk

Buta Huruf	:	92 Jiwa	SLTP/sederajat	:	1.907 Jiwa
Tidak Tamat SD	:	82 Jiwa	SLTA/sederajat	:	1.746 Jiwa
SD	:	243 Jiwa	PT	:	438 Jiwa

Sumber: Data Profil Kalurahan Nglipar 2023

## 7. Sosial ekonomi

Mengingat tingkat pendidikan yang relatif rendah, hal tersebut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat kalurahan Nglipar, sehingga berdampak terhadap percepatan pembangunan wilayah kalurahan dari segi sarana dan prasarana dan laju perekonomian masyarakat perdesaan. Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mata pencaharian penduduk lebih didominasi sebagai petani, buruh tani dan buruh harian lepas, meskipun banyak upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui rintisanrintisan industri rumah tangga, akan tetapi selalu terkendala dengan permodalan dan pemasaran hasil produksinya.

Sebagai gambaran Mobilitas dan Kegaitan Penduduk adalah sebagai berikut:

### a. Kelompok Pekerjaan

Tabel 2.3  
Jumlah Berdasarkan Pekerjaan

Petani	:	1.081 Jiwa	Pengrajin	:	14 Jiwa
Buruh Tani	:	90 Jiwa	Pedagang	:	184 Jiwa
Buruh Swasta	:	689 Jiwa	Peternak	:	374 Jiwa
PNS	:	107 Jiwa	Jasa	:	47 Jiwa

Sumber: Data Profil Kalurahan Nglipar 2023

b. Ketenagakerjaan

Berdasarkan tingkat Pendidikan penduduk rendah, sehingga dibidang ketenagakerjaan bagi masyarakat di kalurahan Nglipar mulai usia 15 tahun sampai dengan usia 60 tahun masih dominan sebagai tenaga kerja di bidang pertanian.

Tabel 2.4  
Tingkat Pendidikan Penduduk

Penduduk usia 15 s.d 60 tahun	:	2.998 Jiwa
Ibu Rumah Tangga	:	607 Jiwa
Penduduk Masih Sekolah	:	648 Jiwa

Sumber: Data Profil Kalurahan Nglipar 2023

8. Budaya

Masyarakat Kalurahan Nglipar memiliki sejarah penting di Kapanewon Nglipar, bahkan di Kabupaten Gunungkidul, yang secara turun temurun masyarakat kalurahan Nglipar sangat kental dengan hal spiritualitas. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya kegiatan – kegiatan masyarakat untuk selalu memperingati hari – hari penting terjadinya sejarah kalurahan Nglipar dan melanjutkan budaya leluhurnya. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat kalurahan Nglipar merupakan sarana pemersatu hubungan individu maupun kelompok masyarakat.

Nglipar adalah salah satu nama sebuah wilayah dikabupaten Gunungkidul bagian utara. Kata nglipar bermula dari nama seorang pria yang menjadi sesepuh suatu kelompok orang yang pada waktu itu mendiami suatu tempat yang belum mempunyai nama. Beliau bernama Kyai Lipar. Pada waktu itu datanglah seorang pria ke tempat

tersebut yang ternyata beliau adalah seorang Demang bernama Raden Demang Mangun Wedono. Beliau diutus oleh pemerintahan pada waktu itu bernama Kepanjen yang dipimpin oleh seorang Panji untuk menenteramkan dan memimpin daerah Gunung Sewu bagian utara. Beliau bertemu dengan Kyai Lipar dan menyampaikan maksud kedatangannya, atas perintah Kepanjen. Dan dari pertemuan tersebut maka daerah itu diberi nama Nglipar yang diambilkan dari nama seorang tokoh atau sesepuh tempat tersebut yaitu Kyai Lipar. Selanjutnya Raden demang mangun wedono melanjutkan perjalana pergi kearah utara dan mesanggrah disana. Kemudian tempat atau Pesanggrahan tersebut diberi nama Trukan Kajar dimoro. Dari Nglipar pesanggrahan tersebut berjarak 1 KM ke arah utara. Pada akhirnya Nglipar yang asli (tempat pertemuan pertama antara R. Demang Mangun Wedono dengan Kyai Lipar) berubah nama menjadi Nglipar Kidul dan Trukan Kajar dimoro menjadi Nglipar Lor.

Hal ini menjadi sejarah terbentuknya Kalurahan Nglipar. Pada mulanya Nglipar merupakan wilayah sebuah Kademangan yang dipimpim oleh seorang Demang yang bernama Raden Demang Mangun Wedono. Kademangan Nglipar berdiri sejak masa pemerintahan Kepanjen yang dipimpin oleh seorang Panji. Mulai tahun 1908 masa pemerintahan kademangan berakhir, yang kemudian menjadi sebuah Kalurahan. Namun demikian karena sesuatu dan lain hal pergantian pemerintahan baru dapat dilaksakan pada tahun 1912. Karena usia R Demang mangun wedono sudah sepuh untuk menjadi seorang Lurah beliau digantikan cucunya yang bernama Ki Mangun Tirto II. Kimangun Tirto II adalah anak dari Ki Mangun Tirto I anak dari R Demang Mangun Wedono yang pada masa itu membantu ayahnya menjalankan

roda Pemerintahan Kademangan. Atas narasi dari kronologi tersebut menjadikan sejarah berdirinya Kalurahan Nglipar.

Dengan kepemilikan sejarah penting bagi masyarakat kalurahan Nglipar inilah, secara turun temurun selalu terjaga kerukunan antar warganya, dan atas narasi itu pula budaya untuk memperkuat persatuan selalu dilakukan. Setidaknya budaya hidup rukun yang dianggap masih relevan dan menjadi keharusan untuk dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

## Kesenian, Adat dan Budaya

No	JENIS BUDAYA	NAMA KELOMPOK/PENGELOLA	ALAMAT/ PADUKUHAN	JUMLAH ANGGOTA
I.	<b>SEDHEKAH SASI :</b>			
	1. Kenduri Sura	Tokoh Budaya Tingkat RT dan Padukuhan	Sumberjo, Mengger, Nglipar Lor, Nglipar Kidul, Ngaliyan, Kedungranting	20 orang
	2. Kenduri Muludan			20 orang
	3. Kenduri Ruwahan			20 orang
	4. Kenduri Selikuran			20 orang
	5. Kenduri Riyaya Syawal			20 orang
II.	<b>SEDHEKAH BUMI :</b>			
	1. Methik	Tokoh Budaya Tingkat RT, Padukuhan, dan Kalurahan	Sumberjo, Mengger, Nglipar Lor, Nglipar Kidul, Ngaliyan, Kedungranting	10 orang
	2. Ngentas – entasi			20 orang
	3. Bersik Kali			60 orang
	4. Rasulan			1.400 orang
III.			WILUJENGAN TUMRAP MANUNGSA WIWIT LAHIR TEKAN PATI	

	1. Puputan			20 orang
	2. Selapanan			20 orang
	3. Nyetahuni			20 orang
	4. Sunatan			30 orang
	5. Ijab			30 orang
	6. Tingkeban			20 orang
	7. Singsetan	Tokoh Budaya Tingkat RT dan Padukuhan	Sumberjo, Mengger, Nglipar Lor, Nglipar Kidul, Ngaliyan, Kedungranting	30 orang
	8. Sur Tanah			10 orang
	9. Nelung dina			30 orang
	10. Matang puluh dina			30 orang
	11. Nyatus dina			30 orang
	12. Mendhak Pisan			30 orang
	13. Mendhak Pindho			30 orang
	14. Nyewu dina			30 orang
IV.	BUDAYA SENI			
	1. Seni Karawitan	Langen Rini	Nglipar Kidul	28 orang
		Asri Raras	Ngaliyan	32 orang
		Margo Laras	Mengger	26 orang
	2. Jathil	Wahyu Turonggo	Mengger	35 orang
	- Jathil Kreasi	Pamong Bheksa	Sumberjo	20 orang
	3. Seni Reog	Ngudi Raras	Ngaliyan	20 orang

	4. Seni Kethoprak	Pamong Bheksa	Sumberjo	30 orang
		Marsudi Budaya	Ngaliyan	40 orang
		Langen Budaya	Nglipar Lor	40 orang
	5. Seni Tari	Pamong Bheksa	Sumberjo	30 orang
	6. Seni Hadrah	Nurul Musthofa	Ngaliyan	12 orang
	7. Seni Gejog Lesung	Kridha Rini	Nglipar Kidul	10 orang
		Margo Laras	Mengger	9 orang
		Asri Raras	Ngaliyan	12 orang
	8. Seni Thoklik	Tokoh Seni Budaya Tingkat RT dan Padukuhan	Sumberjo, Mengger, Nglipar Lor, Nglipar Kidul, Ngaliyan	20 orang
	9. Seni Kridha Basa	Pamong Bheksa	Sumberjo	15 orang
	10. Seni Perkusi	Uwuh Perccusion	Ngaliyan	15 orang
	11. Campur Sari	Among Laras	Nglipar Lor	18 orang
	11. Entertainment	Walet Entertainment	Nglipar Lor	12 orang
	12. Wayang Cakruk	Waluya	Nglipar Lor	Orang

Sumber: Data Profil Kalurahan Nglipar 2023

## 9. Pemerintahan

Nglipar terdiri dari Lurah beserta Pamong dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Lurah dan Pamong berperan sebagai pelaksana kegiatan dan teknis sedangkan Badan Permusyawaratan Kalurahan memiliki berperan membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan bersama Lurah serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat sebagai referensi terhadap pembuatan program.

### a. Pemerintah Kalurahan

Pemerintah Kalurahan terdiri dari :

1) Lurah

2) Unsur kesektariatan :

1) Carik Koordinator

2) Tatalaksana

3) Danarta

4) Pangripta

3) Unsur Pelaksana Teknis

1) Jagabaya

2) Ulu-ulu

3) Kamituwa

4) Unsur Staf

1) Staf Kamituwa

2) Staf Tatalaksan

3) Staf Danarta

4) Staf Pangripta

## b. Badan Permusyawaratan Kalurahan

Mengacu jumlah penduduk, Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglipar ditentukan jumlahnya sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 6 perwakilan wilayah se kalurahan Nglipar dan perwakilan perempuan.

Susunan tata kerja BAMUSKal adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua merangkap anggota
- 2) Wakil Ketua merangkap anggota
- 3) Sekretaris
- 4) 3 (tiga) Ketua Bidang dan 3 (tiga) Anggota Bidang

## 10. Keuangan

Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan kalurahan, Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan merumuskan program pembangunan selama jabatan Lurah yang bersumber dari Visi dan Misi Calon Lurah terpilih dan issu-issu strategis atau program dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang sudah menjadi Dokumen Pemerintah kalurahan.

Dokumen tersebut dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dirumuskan dalam forum Musyawarah Kalurahan oleh BAMUSKal bersama Lurah dan seluruh elemen masyarakat se-kalurahan Nglipar. Hasil dari perumusan RPJMKal ditentukan untuk dilaksanakan pada setiap tahun selama jabatan Lurah sesuai peraturan perundangan yang berlaku bagi Kalurahan.

Pertimbangan yang menjadi acuan menentukan kegiatan pembangunan setiap tahunnya terutama mengacu pada kemampuan keuangan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Bantuan dari

Pemerintah Provinsi, Bantuan dari Pemerintah Kabupaten serta Bantuan dari Pihak ketiga yang tidak mengikat.

a. Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Desa
- 2) Alokasi Dana Desa
- 3) Bantuan Keuangan Provinsi
- 4) Bantuan Keuangan Kabupaten
- 5) Pengembalian Pajak dan Retribusi
- 6) Pendapatan Asli Kalurahan
- 7) Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

b. Belanja Kalurahan

Dari sejumlah pendapatan yang dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang telah tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan kalurahan (APBKal)

1) Belanja Pemerintahan

Belanja Pemerintahan diantaranya adalah meliputi Gaji Pegawai, Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKal), Belanja Rutin Kantor untuk Operasional kesekretariatan, Pemeliharaan Gedung Kantor, Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan lain – lain.

## 2) Belanja Pembangunan

Belanja Pembangunan adalah belanja untuk bebagai kegiatan Fisik maupun Non Fisik, antara lain adalah : Pembangunan Infrastruktur, pelatihan-pelatihan dan pembinaan bagi kelompok ekonomi masyarakat, kelompok ternak, kelompok tani, penambahan modal Badan Usaha Milik Kalurahan, Operasional Lembaga Kemasyarakatan (LPMKAL, PKK, Karang Taruna, RW, RT), Pelestarian Budaya dan Seni Budaya dan lain-lain.

## 3) Belanja Kemasyarakatan

Dalam hal Belanja kemasyarakatan meliputi : Pemberian Honor kepada Tendik PPAUD, Kader Kesehatan, Kader Yandu, Penanganan Stunting, Panganan bagi komunitas Disabilitas, Pengentasan kemiskinan melalui bantuan tunai dan lain-lain.

## B. Profil Padukuhan Mengger

Padukuhan Mengger merupakan salah satu dari padukuhan yang berada di Kalurahan Nglipar yang didalamnya terdapat RW 2 dan memiliki 8 RT, untuk sarana dan prasana bangunan sendiri terdapat Balai Padukuhan, TK, PAUD, Masjid, dan Pos Ronda. Di Padukuhan Mengger sendiri terdapat Kelompok PKK, KWT, Kelompok Tani, Karang Taruna, Jagawarga, dan Kelompok Ternak. Untuk perekonomian sendiri mayoritas masyarakat bekerja pada sektor pertanian, tidak jarang juga anak muda di Padukhan Mengger keluar wilayah untuk bekerja, tidak hanya itu di padukuhan mengger juga terdapat beberapa pelaku usaha atau UMKM baik dari segi makanan, barang ataupun jasa. Untuk kegiatan yang ada di padukuhan mengger sendiri cukup terjadwal dan rutin

dilakukan, seperti pertemuan RT, Posyandu Balita maupun Remaja, pertemuan PKK, pertemuan KWT.

Jumlah KK yang ada di Padukuhan Mengger sebanyak 231. Penduduk sampai bulan desember 2023 sebanyak 732 dengan golongan laki-laki sebanyak 363 dan perempuan sebanyak 369 jiwa.

### C. Profil UMKM Lestari Padukuhan Mengger

UMKM Lestari Padukuhan Mengger berdiri pada tanggal 5 September 2023 bertempat di Balai Padukuhan Mengger yang di didirikan oleh mahasiswa KKN STPMD APMD Yogyakara angkatan 58. Di UMKM Lestari terdapat banyak usaha yang ada akan tetapi untuk saat ini UMKM Lestari menekuni usaha ampiang. Jumlah anggota kelompok UMKM Lestari Padukuhan Mengger sebanyak 27 orang yang di dalamnya.

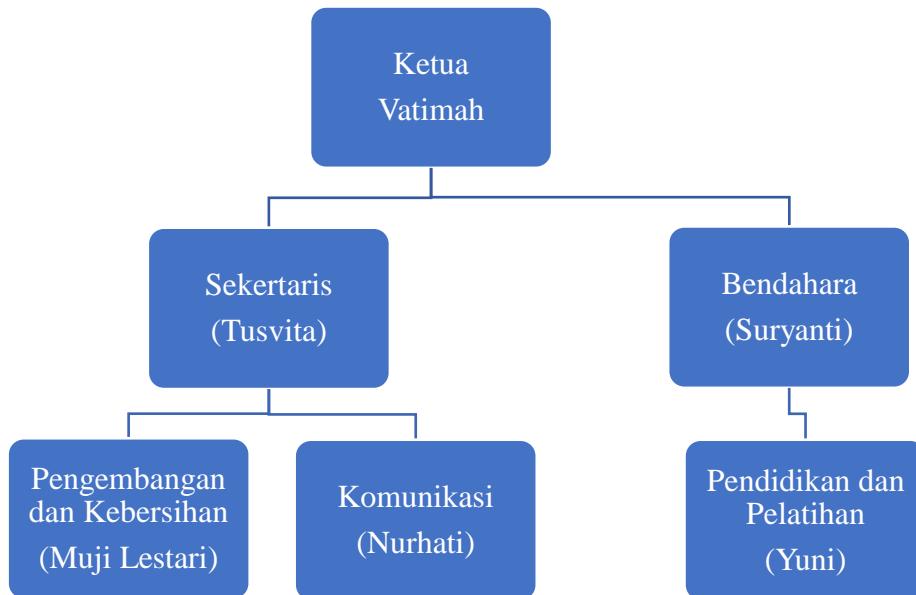
Dipadukuhan mengger sendiri terdapat berbagai jenis UMKM yang ada :

Tabel 2.6 Pelaku dan Usaha UMKM

No	Nama	Usaha
1.	Puji Lestari	Onde-onde dan kue kering
2.	Suryanti	Susu kedelai
3.	Basuki Purnomo	Bakpia
4.	Mardia	Arang
5.	Nurdihayati	Catering
6.	Yuni ertiana	Sayur dan bakso
7.	Muji Lestari	Keranjang
8.	Ngatini	Kerupuk dan Ternak lele
9.	Wahyu tus vita	Kue
10.	Martini	Kelontong

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2024

Gambar 2. 1 Struktur Kelompok UMKM Lesta 1



Sumber: Data Profil Padukuhan Mengger Kalurahan Nglipar 2023

a. Kegiatan

- 1) Pertemuan Rutin: UMKM Lestari mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan perkembangan usaha, berbagi pengalaman, dan merencanakan kegiatan selanjutnya. Pertemuan ini juga menjadi ajang bagi anggota untuk saling memberikan dukungan dan masukan.
- 2) Pameran Produk: UMKM Lestari berpartisipasi dalam berbagai pameran lokal untuk memperkenalkan produk-produk unggulan kepada publik. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan visibilitas produk, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menjalin jaringan dengan calon pembeli dan mitra usaha.

b. Hasil yang telah diperoleh

- 1) Peningkatan Keterampilan Masyarakat: Melalui program pelatihan yang diadakan oleh mahasiswa KKN, banyak anggota masyarakat yang berhasil meningkatkan keterampilan dalam produksi dan pemasaran. Pelatihan ini mencakup teknik produksi yang efisien, manajemen usaha, dan pemasaran digital.
- 2) Pengembangan Produk Lokal: UMKM Lestari berhasil mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai produk lokal yang memiliki potensi untuk dipasarkan, seperti kerajinan tangan, produk makanan khas, dan barang-barang ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya meningkatkan nilai produk lokal, tetapi juga menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap hasil karya mereka.
- 3) Peningkatan Pendapatan: Dengan adanya UMKM Lestari, beberapa pelaku usaha lokal melaporkan peningkatan pendapatan. Produk yang dihasilkan mulai menarik perhatian pembeli, baik dari dalam maupun luar daerah, sehingga menciptakan peluang pasar yang lebih luas.

c. Sejarah singkat berdirinya UMKM Padukuhan Mengger

UMKM Lestari Padukuhan Mengger berdiri pada tanggal 5 September 2023 bertempat di Balai Padukuhan Mengger yang di dirikan oleh mahasiswa KKN STPMD APMD Yogyakara angkatan 58, yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Dalam proses pendirian UMKM ini, mahasiswa KKN melakukan riset mendalam mengenai potensi dan kebutuhan masyarakat

setempat. Mereka mengidentifikasi berbagai produk lokal yang dapat dikembangkan, serta merancang program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas para pelaku usaha. Dengan semangat kolaboratif, UMKM Lestari diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkarya, berinovasi, dan meningkatkan kesejahteraan.

Sejak berdirinya, UMKM Lestari telah berfokus pada produk-produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sejalan dengan namanya "Lestari". Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan para mahasiswa, UMKM ini berupaya untuk tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga sebagai pendorong perubahan sosial dan ekonomi di Padukuhan Mengger Kalurahan Nglipar.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

##### **A. Peran Pemerintah Kalurahan**

Pemerintah kalurahan memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tingkat lokal. Dalam konteks ini, pemerintah kalurahan bertugas sebagai penghubung antara pelaku UMKM dan berbagai sumber daya yang dapat mendukung pengembangan usaha mereka. Salah satu aspek utama dari peran ini adalah memberikan akses kepada pelaku UMKM terhadap informasi yang relevan mengenai perizinan, pemasaran, dan teknologi terbaru. Dengan menyediakan pelatihan dan workshop, pemerintah dapat membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan teknis, sehingga mereka dapat bersaing lebih baik di pasar.

Selain itu, pemerintah kalurahan juga berfungsi sebagai fasilitator dalam menciptakan jaringan antar pelaku UMKM. Dengan mengorganisir acara seperti bazar, pameran, atau seminar, pemerintah dapat membantu pelaku UMKM untuk saling berinteraksi, berbagi pengalaman, dan membangun kolaborasi. Kegiatan semacam ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka, tetapi juga membuka peluang untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan.

Dalam kapasitasnya sebagai inovator, pemerintah kalurahan berupaya menciptakan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Ini bisa melibatkan pengembangan program yang mendorong penggunaan teknologi modern dalam proses

produksi atau pemasaran. Ketika pemerintah berkolaborasi dengan lembaga pendidikan atau penelitian, mereka dapat menghasilkan ide-ide baru yang relevan dan mudah diimplementasikan oleh pelaku UMKM. Dengan cara ini, pemerintah tidak hanya membantu memperkenalkan inovasi, tetapi juga membangun budaya inovasi di kalangan pelaku usaha.

Pemerintah kalurahan juga berperan sebagai dinamisator, yang bertugas membangkitkan semangat dan motivasi pelaku UMKM untuk terlibat aktif dalam berbagai program dan kegiatan. Dengan menciptakan suasana yang positif dan mendukung, pemerintah dapat mendorong pelaku UMKM untuk berinovasi dan berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi lokal. Misalnya, melalui penghargaan atau pengakuan terhadap usaha yang berhasil, pemerintah dapat memberikan insentif bagi pelaku UMKM untuk terus berusaha dan berprestasi.

Sebagai organisator, pemerintah kalurahan memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Ini mencakup penyelenggaraan pelatihan, bazar, dan program peningkatan kapasitas lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, setiap kegiatan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program yang dijalankan tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.

Dalam peran sebagai regulator, pemerintah kalurahan juga bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Kebijakan yang pro-UMKM, seperti kemudahan dalam proses perizinan dan akses kepada modal, akan memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis

mereka. Dengan menetapkan regulasi yang jelas dan adil, pemerintah dapat mendorong pelaku UMKM untuk beroperasi secara formal dan meningkatkan usaha mereka.

Dengan menjalankan semua peran di atas secara efektif, pemerintah kalurahan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Dukungan yang konsisten dan responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM tidak hanya akan memperkuat posisi mereka dalam perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan UMKM dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian kalurahan.

## **1. Sebagai fasilitator**

Pemerintah kalurahan memegang peran penting dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tingkat lokal. Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, pemerintah kalurahan bertugas untuk menghubungkan pelaku UMKM dengan berbagai sumber daya dan informasi yang diperlukan. Hal ini mencakup penyediaan akses ke pelatihan, pendanaan, dan jaringan bisnis yang dapat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan mengorganisir seminar, workshop, dan pameran, pemerintah dapat memberikan wadah bagi pelaku UMKM untuk belajar dan berbagi pengalaman. Ketika pemerintah berhasil menciptakan suasana yang inklusif dan mendukung, pelaku UMKM akan merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam program-program yang ada.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam peran ini sering kali muncul dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kalurahan. Keterbatasan anggaran, fasilitas, serta jumlah staf yang terlatih dapat menghambat kemampuan

pemerintah untuk memberikan dukungan yang optimal. Selain itu, kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya partisipasi dalam program-program yang ditawarkan juga menjadi faktor kunci. Jika masyarakat tidak menyadari manfaat dari program yang ada, mereka mungkin tidak mau terlibat, sehingga mengurangi efektivitas peran pemerintah sebagai fasilitator.

Berdasarkan pemikiran di atas hal ini di sampaikan oleh Pak Agung Murdianto dalam hal peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:

“Kalau selama ini cuman baru satu kali pelatihan mas, pelatihan kemasan ini jadi pengemasannya dalam meningkatkan UMKM dan Kalau dukungan untuk permodalan itu kami lewat BUMDesa, jadi mereka pinjam di BUMDesa buat penaganan modal (hasil wawancara bersama Pak Carik, 29/08/2024).”

Dalam wawancara tersebut di atas, terdapat beberapa poin penting yang dapat dianalisis mengenai pelatihan kemasan dan dukungan permodalan. Pertama, pelatihan kemasan yang hanya dilakukan satu kali menunjukkan bahwa ada keterbatasan dalam akses pendidikan dan pengembangan keterampilan bagi pelaku usaha. Pelatihan ini penting karena kemasan yang baik tidak hanya meningkatkan daya tarik produk, tetapi juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas. Dengan kata lain, pengemasan yang menarik dan fungsional dapat menjadi salah satu strategi pemasaran yang efektif.

Namun, satu kali pelatihan saja mungkin tidak cukup untuk menghasilkan perubahan yang signifikan. Pelaku usaha perlu mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan agar dapat mengadaptasi tren dan teknologi baru dalam kemasan. Dengan demikian, dukungan dalam bentuk pelatihan berulang atau workshop tambahan bisa menjadi langkah yang lebih efektif. Ini juga mencerminkan perlunya

kolaborasi antara lembaga pelatihan, pemerintah, dan sektor swasta untuk menyediakan lebih banyak kesempatan belajar.

Selanjutnya, terkait dukungan permodalan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), ini adalah langkah yang positif. BUMDesa berperan penting dalam menyediakan akses keuangan bagi pelaku usaha di tingkat lokal. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa proses peminjaman di BUMDesa harus dilakukan dengan transparansi dan sistem yang jelas agar tidak membebani peminjam. Selain itu, pelaku usaha perlu didampingi dalam pengelolaan modal yang diperoleh, agar dana tersebut digunakan secara efektif untuk peningkatan usaha mereka.

Hal ini juga disampaikan lanjut oleh Ibu Puji Lestari dalam hal peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:

“Ya memang ada pelatihan mas tapi tidak sering, kadang pelatihannya juga enam bulan sekali. Dan kemarin pelatihan baru di adakan, pelatihan pembuatan produk baru, cara pengemasan. Untuk pelatihan kemarin ditanggung semua oleh pihak pemerintah kalurahan. Dari dana, alat-alat pelatihan sampai transportasi (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM, 29/08/2024).”

Wawancara tersebut mengungkapkan beberapa aspek penting terkait pelatihan yang diadakan untuk pelaku usaha, serta dukungan dari pemerintah kalurahan. Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa pelatihan yang diadakan hanya berlangsung enam bulan sekali. Ini menunjukkan adanya interval yang cukup panjang antara sesi pelatihan, yang dapat membatasi kemampuan pelaku usaha untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan terbaru. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, terutama dalam hal inovasi produk dan pemasaran, keterbatasan frekuensi pelatihan dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk bersaing.

Pelatihan yang baru saja diadakan, yang berfokus pada pembuatan produk baru dan cara pengemasan, merupakan langkah positif. Pembuatan produk baru sangat penting untuk menjaga relevansi di pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah-ubah. Selain itu, pengemasan yang baik tidak hanya berfungsi untuk melindungi produk tetapi juga berperan dalam menarik perhatian konsumen. Ketika pelaku usaha dilatih dalam kedua aspek ini, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saingnya.

Dukungan penuh dari pihak pemerintah kalurahan dalam pelatihan ini, mencakup pendanaan, penyediaan alat-alat, dan transportasi, merupakan hal yang patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya dukungan tersebut, pelaku usaha dapat fokus pada pembelajaran tanpa khawatir tentang biaya yang harus dikeluarkan. Namun, keberhasilan pelatihan tidak hanya bergantung pada fasilitas yang disediakan, tetapi juga pada kualitas materi pelatihan dan kemampuan instruktur dalam menyampaikan informasi.

Meskipun ada upaya dari pemerintah, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan akan pelatihan yang lebih sering dan berkelanjutan. Dengan frekuensi pelatihan yang lebih tinggi, pelaku usaha dapat lebih cepat mengadopsi inovasi dan strategi baru, serta beradaptasi dengan perubahan pasar. Selain itu, evaluasi pasca-pelatihan juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa peserta benar-benar dapat menerapkan apa yang telah dipelajari dalam usaha mereka.

Dengan penyampaian di atas, hal ini sedikit berbeda yang disampaikan oleh Pak Muhammad Allim Wahyudi dalam hal peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:

“Saya lihat selama ini pemerintah kalurahan sendiri kurang memberikan pelatihan kepada pelaku umkm, walaupun pemerintah sebagai fasilitator tapi kurang menjalankan tugasnya sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator kan bukan hanya memberikan pelatihan saja kan mas? Tapi juga mendukung permodalannya ijinnya mungkin. Tapi selama ini hampir tidak ada mas, kalaupun ada paling sekali dalam enam bulan atau dalam setahun (hasil wawancara bersama masyarakat padukuhan Mengger, 29/08/2024).”

Wawancara ini mengungkapkan keprihatinan yang mendalam mengenai peran pemerintah kalurahan sebagai fasilitator dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun pemerintah dianggap sebagai fasilitator, kenyataannya mereka tampak kurang aktif dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Pelaku UMKM membutuhkan dukungan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya terbatas pada pelatihan, tetapi juga mencakup aspek permodalan dan izin usaha.

Penting untuk memahami bahwa peran fasilitator seharusnya mencakup berbagai aspek yang mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. Pelatihan adalah salah satu elemen kunci, tetapi untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi pelaku usaha, dukungan lain seperti akses permodalan, bantuan dalam pengurusan izin, dan pendampingan bisnis juga sangat diperlukan. Ketika pemerintah tidak memberikan dukungan yang memadai dalam hal ini, pelaku UMKM akan menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat perkembangan usaha mereka.

Fakta bahwa pelatihan hanya diadakan sekali dalam enam bulan atau setahun menunjukkan adanya keterbatasan dalam penyediaan sumber daya dan komitmen pemerintah untuk memberdayakan pelaku UMKM. Frekuensi pelatihan yang rendah

bisa menyebabkan pelaku usaha kehilangan kesempatan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, terutama dalam industri yang terus berubah. Selain itu, kurangnya dukungan dalam hal permodalan membuat pelaku UMKM sulit untuk mengembangkan usaha mereka lebih lanjut. Tanpa akses yang memadai ke dana, mereka mungkin tidak dapat memanfaatkan peluang yang ada di pasar.

Dari perspektif ini, tampak jelas bahwa ada kesenjangan antara harapan pelaku UMKM dan realitas dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk memperbaiki situasi ini, perlu ada evaluasi terhadap program dukungan yang ada dan bagaimana pemerintah kalurahan dapat lebih proaktif dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator. Membangun kemitraan yang lebih kuat dengan pelaku UMKM, serta memahami kebutuhan spesifik mereka, bisa menjadi langkah awal yang baik.

Dengan meningkatkan frekuensi pelatihan dan menyediakan dukungan permodalan yang lebih baik, pemerintah tidak hanya dapat membantu pelaku UMKM bertahan, tetapi juga mendorong mereka untuk berkembang dan berinovasi. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **2. Sebagai inovator**

Saat pemerintah kalurahan bertindak sebagai inovator, mereka dituntut untuk menciptakan solusi baru yang relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM. Inovasi ini bisa berupa pengembangan produk, teknologi, atau bahkan model bisnis yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Faktor yang mendukung peran ini meliputi adanya kolaborasi dengan lembaga penelitian atau universitas yang dapat menyediakan pengetahuan dan teknologi baru. Ketika pemerintah mampu memperkenalkan ide-ide

segar dan inovatif, pelaku UMKM akan lebih terbuka untuk beradaptasi dan menerapkan pendekatan baru dalam usaha mereka.

Namun, dalam konteks inovasi, pemerintah juga menghadapi tantangan. Keterbatasan dalam akses terhadap informasi dan teknologi terbaru dapat menjadi penghalang bagi pemerintah untuk memfasilitasi inovasi yang diperlukan. Selain itu, budaya lokal yang cenderung konservatif dapat membuat pelaku UMKM ragu untuk mencoba pendekatan baru. Jika pemerintah tidak dapat mengatasi resistensi ini, potensi inovasi yang seharusnya muncul bisa terhambat, sehingga membatasi daya saing UMKM di pasar.

Berdasarkan pemikiran di atas hal ini di sampaikan oleh Pak Agung Murdianto dalam hal peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:

“Kalau sebagai inovator kami dari pemerintah kalurahan kami memfasilitasi pelatihan juga. Memfasilitasi pelatihan inovasi produk pemasaran, pengemasan dan akses permodalan lewat BUMDesa (hasil wawancara bersama Pak Carik, 29/08/2024).”

Wawancara ini terlihat bahwa peran aktif pemerintah kalurahan sebagai inovator dan fasilitator dalam mendukung pengembangan pelaku UMKM. Dengan menyediakan pelatihan yang mencakup inovasi produk, pemasaran, dan pengemasan, pemerintah menunjukkan kesadaran akan pentingnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan bagi pelaku usaha. Inovasi produk menjadi kunci untuk menarik perhatian konsumen, sedangkan pemahaman tentang pemasaran dan pengemasan yang efektif dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.

Dukungan akses permodalan melalui BUMDesa juga sangat signifikan, mengingat modal sering kali menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan memfasilitasi akses ini, pemerintah kalurahan membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan, sehingga mereka dapat berinvestasi dalam pengembangan produk dan pemasaran. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses peminjaman dilakukan dengan transparansi dan diiringi dengan bimbingan yang memadai untuk mengelola modal tersebut dengan baik.

Meskipun terdapat inisiatif positif dalam program pelatihan dan dukungan permodalan, tantangan tetap ada dalam hal implementasi dan tindak lanjut. Tanpa adanya monitoring dan pendampingan pasca-pelatihan, pelaku UMKM mungkin kesulitan dalam menerapkan pengetahuan baru yang mereka peroleh. Oleh karena itu, pemerintah kalurahan perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem dukungan yang lebih berkelanjutan, agar pelaku UMKM dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika pasar, serta memaksimalkan potensi yang ada.

Hal ini juga disampaikan lanjut oleh Ibu Puji Lestari dalam hal peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:

“Ya untuk pelatihan kemarin ada mas, pemerintah kalurahan memfasilitasi pelatihan dan pembekalan kepada pelaku UMKM. Kami diberikan pelatihan inovasi produk, pemasaran digital, dan pengemasan mas, tapi untuk kelanjutannya sudah tidak ada lagi mas. Misalnya untuk monitoring setelah pelatihan tidak ada lagi (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM, 29/08/2024).”

Wawancara di atas mencerminkan adanya upaya positif dari pemerintah kalurahan dalam memfasilitasi pelatihan bagi pelaku UMKM, dengan memberikan

pembekalan tentang inovasi produk, pemasaran digital, dan pengemasan. Pelatihan semacam ini sangat penting, terutama di era digital, di mana pelaku usaha perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Penyediaan pelatihan dalam aspek-aspek ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan kebutuhan pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka.

Namun, meskipun pelatihan tersebut telah dilaksanakan, terdapat kekurangan signifikan dalam hal tindak lanjut dan dukungan berkelanjutan. Ketidakadaan monitoring setelah pelatihan menjadi masalah yang perlu dicermati. Monitoring sangat penting untuk memastikan bahwa peserta dapat menerapkan apa yang telah dipelajari dan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan. Tanpa adanya pendampingan atau evaluasi pasca-pelatihan, pelaku UMKM mungkin kesulitan dalam mengimplementasikan inovasi yang telah mereka pelajari, sehingga potensi manfaat dari pelatihan tersebut tidak sepenuhnya terwujud.

Selain itu, pelaku UMKM sering kali menghadapi tantangan dalam menerapkan konsep-konsep baru yang mereka pelajari tanpa adanya bimbingan lanjutan. Misalnya, dalam hal pemasaran digital, banyak pelaku usaha yang mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk memahami alat dan strategi yang efektif, serta untuk mengatasi masalah teknis yang mungkin muncul. Jika tidak ada dukungan berkelanjutan, pelatihan dapat menjadi kurang efektif, dan pelaku UMKM mungkin kehilangan motivasi atau arah dalam pengembangan usaha mereka.

Dari analisis ini, terlihat bahwa meskipun ada inisiatif yang baik dari pemerintah kalurahan, keberlanjutan program pelatihan dan monitoring pasca-pelatihan sangat penting untuk keberhasilan pelaku UMKM. Pemerintah perlu mempertimbangkan

untuk mengembangkan program pendampingan yang lebih terstruktur, di mana pelaku UMKM dapat terus mendapatkan bimbingan dan dukungan, serta dibantu dalam menghadapi tantangan yang muncul setelah pelatihan. Dengan cara ini, pelatihan tidak hanya menjadi acara sekali saja, tetapi dapat menjadi bagian dari proses pengembangan yang berkelanjutan, sehingga pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi dinamika pasar dan berkembang dengan lebih baik.

Hal ini juga disampaikan lanjut oleh Ibu Vita dalam hal peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:

“Dari pemerintah kalurahan memfasilitasi pelatihan inovasi produk pengemasan dan pemasaran. Tapi dalam satu tahun terakhir ini mungkin hanya sekali atau dua kali saja pelatihan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kalurahan. Soalnya lupa juga mas karena memang kalua terkait pelatihan inikan jangkanya panjang dan tidak terlalu dirutinitaskan sehingga masyarakat atau pelaku UMKM kurang paham dalam meningkatkan UMKM (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM, 30/08/2024).”

Wawancara di atas mengungkapkan adanya upaya dari pemerintah kalurahan dalam memfasilitasi pelatihan terkait inovasi produk, pengemasan, dan pemasaran. Namun, frekuensi pelatihan yang hanya dilakukan satu atau dua kali dalam setahun menunjukkan kelemahan dalam pendekatan yang diambil. Dalam konteks pengembangan UMKM, pelatihan yang teratur dan berkesinambungan sangat penting agar pelaku usaha dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, terutama di era yang cepat berubah ini.

Keterbatasan jumlah pelatihan dalam setahun dapat menyebabkan pelaku UMKM merasa kurang paham dan tidak siap dalam menghadapi tantangan yang ada. Masyarakat mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang cukup tentang pentingnya inovasi dan strategi pemasaran yang efektif, sehingga kemampuan mereka untuk

bersaing di pasar menjadi terhambat. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih proaktif dari pemerintah kalurahan untuk meningkatkan frekuensi pelatihan dan memperluas jangkauan topik yang dibahas.

Untuk mengatasi masalahini, pemerintah kalurahan perlu mempertimbangkan untuk merancang program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk menciptakan mekanisme monitoring dan evaluasi yang memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan dukungan berkelanjutan setelah pelatihan. Dengan pendekatan semacam ini, pelaku UMKM akan lebih mampu memahami dan menerapkan pengetahuan yang didapat, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan usaha mereka secara signifikan.

### **3. Sebagai dinamisator**

Sebagai dinamisator, pemerintah kalurahan memiliki peran penting dalam membangkitkan semangat dan motivasi pelaku UMKM. Mereka harus mampu menciptakan suasana yang mendukung kolaborasi dan partisipasi aktif. Melalui kegiatan seperti program penghargaan untuk UMKM yang berprestasi atau event komunitas, pemerintah dapat mendorong pelaku UMKM untuk saling berinteraksi dan berbagi pengalaman. Ketika pemerintah berhasil menciptakan iklim yang positif dan menyenangkan, pelaku UMKM akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam peran ini sering kali berkaitan dengan komunikasi. Jika pemerintah tidak dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat, misalnya melalui transparansi informasi atau pengundangan partisipasi, maka semangat kolaborasi yang diharapkan bisa memudar. Selain itu, faktor eksternal

seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi motivasi pelaku UMKM. Ketika pelaku UMKM menghadapi tekanan ekonomi, fokus mereka mungkin lebih kepada kelangsungan hidup usaha daripada mengembangkan inovasi baru.

Berdasarkan pemikiran di atas hal ini di sampaikan oleh Pak Agung Murdianto dalam hal peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:

“Kami sebagai pemerintah kalurahan ya sering melakukan pendataan dan pemantauan terhadap semua pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di kalurahan ini. Dan juga memfasilitasi akses informasi pasar, dan menjembatani UMKM dengan institut terkait untuk mendapatkan dukungan promosi, dan pemasaran”. Ini kami sudah lakukan sampai sekarang ini (hasil wawancara bersama Pak Carik, 29/08/2024).”

Wawancara tersebut di atas menunjukkan komitmen pemerintah kalurahan dalam mendukung pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pendataan dan pemantauan yang rutin. Kegiatan ini sangat penting untuk memahami dinamika dan kebutuhan pelaku UMKM di kalurahan. Dengan melakukan pendataan, pemerintah dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, serta merancang program dukungan yang lebih tepat sasaran. Pendataan yang akurat juga menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan intervensi yang efektif dalam pengembangan UMKM.

Fasilitasi akses informasi pasar merupakan langkah strategis yang dapat membantu pelaku UMKM untuk lebih memahami peluang yang ada di pasar. Informasi yang tepat dan terkini memungkinkan pelaku usaha untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam hal produk, pemasaran, dan inovasi. Selain itu, menjembatani UMKM dengan institusi terkait untuk mendapatkan dukungan promosi dan pemasaran juga merupakan inisiatif yang sangat positif. Ini dapat membuka akses bagi pelaku usaha

untuk memperluas jaringan dan meningkatkan visibilitas produk mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan pertumbuhan usaha.

Meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan, penting bagi pemerintah kalurahan untuk terus meningkatkan efektivitas program-program tersebut. Monitoring yang berkelanjutan dan evaluasi dari hasil pendataan akan membantu memastikan bahwa dukungan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan pelaku UMKM. Dengan pendekatan yang proaktif dan responsif, pemerintah dapat lebih efektif dalam memberdayakan pelaku UMKM, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hal ini juga disampaikan lanjut oleh Pak Basuki Purnomo dalam hal peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:

“Ya memang sih mas kami sebagai pelaku UMKM di fasilitasi akses informasi pasar dan peluang usaha baru. Pemerintah kalurahan juga menjembatani pelaku UMKM untuk mendapatkan dukungan promosi dan pemasaran (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM, 29/08/2024).”

Hasil wawancara di atas mencerminkan pengakuan pelaku UMKM terhadap peran penting pemerintah kalurahan dalam menyediakan akses informasi pasar dan peluang usaha baru. Fasilitasi informasi yang tepat sangat krusial bagi pelaku usaha, karena dengan memiliki pengetahuan tentang tren pasar dan permintaan konsumen, mereka dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka. Ini membantu pelaku UMKM untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang dinamis.

Selain itu, dukungan dalam promosi dan pemasaran menunjukkan komitmen pemerintah untuk membantu pelaku UMKM mengatasi tantangan yang sering mereka hadapi dalam menjangkau pelanggan. Dengan menjembatani akses ke dukungan promosi, pemerintah tidak hanya meningkatkan visibilitas produk pelaku usaha tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan dan meningkatkan penjualan. Hal ini sangat penting, terutama bagi UMKM yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan promosi secara mandiri.

Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, perlu ada strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam dukungan yang diberikan. Pemerintah kalurahan dapat mempertimbangkan untuk mengadakan pelatihan terkait pemasaran dan promosi agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan informasi pasar secara efektif. Dengan pendekatan ini, pelaku UMKM akan lebih siap untuk mengambil peluang yang ada dan meningkatkan daya saing mereka, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Hal ini juga disampaikan lanjut oleh Pak Muhammad Affan dalam hal peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:

“ Kalau terkait ini sih mas ya dari pemerintah kalurahan paling difasilitasi akses pemasaran, informasi pasar dan peluang usaha baru untuk terus berinovasi (hasil wawancara bersama masyarakat Padukuhan Pengger, 30/08/2024).”

Wawancara ini menyoroti peran pemerintah kalurahan dalam memberikan fasilitas akses pemasaran, informasi pasar, dan peluang usaha baru bagi pelaku UMKM. Dukungan ini sangat penting karena memberikan pelaku usaha alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perkembangan pasar. Dengan memiliki akses yang baik terhadap informasi pasar, pelaku UMKM dapat

mengidentifikasi tren dan kebutuhan konsumen, yang pada gilirannya dapat mendorong inovasi dalam produk dan layanan yang mereka tawarkan.

Namun, meskipun ada dukungan dalam bentuk akses pemasaran dan informasi, keberhasilan pelaku UMKM juga bergantung pada kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan tersebut. Penting bagi pemerintah kalurahan untuk tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga melakukan pendampingan dalam proses inovasi dan pemasaran. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan dukungan yang berkelanjutan, pelaku UMKM akan lebih mampu memanfaatkan peluang yang ada dan meningkatkan daya saing mereka di pasar.

#### **4. Sebagai organisator**

Dalam kapasitasnya sebagai organisator, pemerintah kalurahan memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Ini termasuk mengadakan bazar, pameran, atau program pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan pelaku UMKM. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan sistem pengelolaan yang baik akan sangat mendukung peran ini. Jika pemerintah memiliki tim yang kompeten, mereka akan lebih mampu mengelola kegiatan dengan efisien dan efektif, memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan rencana.

Namun, tantangan yang dihadapi sering kali berkaitan dengan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan. Ketika pemerintah tidak dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pihak lain, program yang direncanakan bisa menjadi tidak terarah atau bahkan saling tumpang tindih. Dalam hal ini, kekurangan dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas juga dapat menjadi

kendala. Jika pemerintah kalurahan tidak memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan, efektivitas kegiatan tersebut bisa menurun.

Berdasarkan pemikiran di atas hal ini di sampaikan oleh Pak Agung Murdianto dalam hal peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:

“Kami dari pemerintah kalurahan memberikan informasi terkini program-program terbaru tentang UMKM, dan juga membantu pelaku UMKM memperoleh izin-izin usaha Nomor induk berusaha (NIB) Surat izin Usaha Kesehatan (SIUK). Dan memfasilitasi pendataan dan pendaftaran pelaku UMKM dikalurahan Nglipar (hasil wawancara bersama Pak Carik, 29/08/2024).”

Wawancara di atas menggambarkan upaya proaktif pemerintah kalurahan dalam memberikan informasi terkini mengenai program-program terbaru yang berkaitan dengan UMKM. Informasi yang tepat dan up-to-date sangat penting bagi pelaku usaha untuk memahami berbagai inisiatif yang dapat mendukung perkembangan bisnis mereka. Dengan menyediakan akses kepada informasi ini, pemerintah membantu pelaku UMKM untuk tetap relevan dan memanfaatkan peluang yang ada di pasar.

Selain itu, bantuan dalam memperoleh izin-izin usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Kesehatan (SIUK), menunjukkan komitmen pemerintah untuk memfasilitasi legalitas usaha. Proses perizinan sering kali menjadi penghalang bagi pelaku UMKM, dan dengan menyediakan dukungan dalam hal ini, pemerintah kalurahan membantu mengurangi birokrasi yang bisa menghambat pertumbuhan usaha. Memiliki izin yang sah hanya memberikan keamanan hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang mereka tawarkan.

Fasilitasi pendataan dan pendaftaran pelaku UMKM di kalurahan Nglipar juga merupakan langkah penting dalam menciptakan database yang akurat. Data yang baik akan memungkinkan pemerintah untuk merancang program-program yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta memonitor perkembangan UMKM secara lebih akurat. Dengan pendataan yang sistematis, pemerintah dapat memahami kebutuhan spesifik pelaku usaha dan merespons dengan kebijakan yang lebih relevan.

Namun, untuk memastikan bahwa semua inisiatif ini memberikan dampak yang maksimal, penting bagi pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pendampingan pasca-pendaftaran dan edukasi mengenai pemanfaatan informasi dan izin yang diperoleh juga akan sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, dukungan pemerintah kalurahan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih signifikan dan berkontribusi pada ekonomi lokal.

Hal ini juga disampaikan lanjut oleh Pak Basuki Purnomo dalam hal peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:

“ Kami difasilitasi pameran atau event penjualan produk UMKM, walaupun tidak sering tapi lumayan berdampak positif bagi kami pelaku UMKM. Tapi untuk pemantauan dari Pemerintah Kalurahan masih kurang. Contohnya Ketika kami mengalami masalah atau hambatan seperti akses bahan baku, riil modal, dan masalah perizinan (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM, 29/08/2024).”

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan telah mengambil langkah positif dengan memfasilitasi pameran atau event penjualan produk UMKM. Meskipun frekuensinya tidak sering, kegiatan ini memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku UMKM, terutama dalam hal meningkatkan visibilitas dan penjualan

produk mereka. Pameran dapat menjadi platform yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka kepada konsumen baru dan membangun jaringan dengan pelaku usaha lainnya.

Namun, meskipun ada dukungan dalam bentuk pameran, pelaku UMKM masih merasakan kurangnya pemantauan dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah kalurahan. Ketika menghadapi masalah seperti akses bahan baku, riil modal, dan perizinan, pelaku usaha merasa bahwa mereka tidak mendapatkan pendampingan yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem dukungan yang ada, di mana pelaku UMKM mungkin membutuhkan lebih dari sekadar acara promosi untuk mengatasi tantangan sehari-hari dalam menjalankan usaha mereka.

Masalah akses bahan baku dan riil modal sering menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk berproduksi dan berkembang. Dalam konteks ini, dukungan dari pemerintah dalam bentuk pemantauan dan pendampingan untuk mengatasi isu-isu tersebut sangat penting. Pelatihan dan workshop mengenai pengelolaan modal dan sumber daya juga dapat membantu pelaku UMKM untuk lebih mandiri dan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi.

Untuk meningkatkan efektivitas dukungan yang diberikan, pemerintah kalurahan perlu memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik, pelaku UMKM dapat lebih mudah melaporkan masalah yang mereka hadapi dan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Dengan pendekatan yang lebih holistik, pemerintah dapat memastikan bahwa pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk berpromosi, tetapi juga dukungan

yang nyata untuk mengatasi tantangan yang ada, sehingga dapat berkembang dengan lebih optimal.

Hal ini juga di sampaikan lanjut oleh Ibu Suryanti dalam hal peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:

“ Ya seperti pelatihan-pelatihan teknis untuk UMKM, untuk bekerja sama dengan Lembaga yang berkaitan gitu tidak ada, tapi kalau untuk pendataan dan pendaftaran pelaku UMKM kemarin ada. Mungkin untuk memudahkan pemberian bantuan pelatihan hingga pemasaran produk UMKM, tapi sampai sekarang belum ada pelatihan lagi mas (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM, 30/08/2024).”

Wawancara di atas mencerminkan adanya kebutuhan yang belum terpenuhi dalam hal pelatihan teknis untuk pelaku UMKM. Meskipun terdapat inisiatif untuk melakukan pendataan dan pendaftaran pelaku usaha, yang bertujuan untuk memudahkan pemberian bantuan, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan menjadi kendala signifikan. Tanpa akses ke pelatihan yang memadai, pelaku UMKM mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka secara efektif.

Kerja sama dengan lembaga terkait untuk menyediakan pelatihan teknis tampak belum terwujud, yang dapat mengakibatkan pelaku usaha kehilangan kesempatan untuk belajar dari para ahli. Pelatihan yang relevan dapat meliputi berbagai aspek, seperti pengelolaan keuangan, pemasaran digital, dan inovasi produk, yang semuanya penting untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar. Keterbatasan dalam hal ini dapat menghambat kemampuan pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan memenuhi tuntutan konsumen.

Meskipun pendataan dan pendaftaran pelaku UMKM adalah langkah positif, penting bagi pemerintah kalurahan untuk segera mengembangkan program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dengan adanya pelatihan yang rutin dan relevan, pelaku UMKM akan lebih siap untuk menghadapi tantangan, serta memanfaatkan peluang yang ada. Dukungan yang lebih komprehensif dalam bentuk pelatihan dan pendampingan akan sangat membantu dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro dan kecil di daerah tersebut.

## 5. Sebagai regulator

Sebagai regulator, pemerintah kalurahan memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Dalam peran ini, dukungan politik dari pemerintah pusat atau daerah sangat penting. Kebijakan yang pro-UMKM, seperti kemudahan perizinan dan akses ke modal, dapat memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Ketika regulasi yang ada mudah dipahami dan diterapkan, pelaku UMKM akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan dan menjalankan usaha mereka secara formal.

Namun, tantangan dalam peran ini sering kali terkait dengan birokrasi yang rumit. Jika proses perizinan terlalu panjang atau sulit, pelaku UMKM mungkin merasa frustrasi dan lebih memilih untuk beroperasi di sektor informal. Selain itu, kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan regulasi juga dapat menimbulkan kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan praktik di lapangan. Jika pemerintah kalurahan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan yang efektif, maka tujuan dari regulasi yang ditetapkan dapat menjadi tidak tercapai.

Berdasarkan pemikiran di atas hal ini di sampaikan oleh Pak Agung Murdianto dalam hal peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:

“ Kemarin kami baru menerbitkan izin usaha bagi pelaku UMKM sesuai aturan daerah terkait, dan mengurus perijinan lingkungan pelaku UMKM yang berisiko polusi seperti kerajinan kayu, pabrik tempe, laundry dan bakpia. Kami juga mengawasi pelaku UMKM agar tetap berjalan sesuai peraturan dan tidak menimbulkan gangguan (hasil wawancara bersama Pak Carik, 29/08/2024).”

Wawancara ini menunjukkan upaya pemerintah kalurahan dalam mendukung pelaku UMKM melalui penerbitan izin usaha yang sesuai dengan aturan daerah. Proses pengurusan izin ini sangat penting, terutama bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang berisiko tinggi terhadap lingkungan, seperti kerajinan kayu dan pabrik tempe. Dengan adanya izin usaha yang sah, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan legalitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.

Pengurusan perizinan lingkungan bagi pelaku UMKM yang berisiko polusi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha mereka tidak merusak lingkungan. Tindakan ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dalam pengembangan UMKM. Dengan memberikan panduan dan pengawasan yang tepat, pemerintah dapat membantu pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang ada, sekaligus mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.

Namun, pengawasan yang dilakukan perlu diimbangi dengan pendampingan agar pelaku UMKM memahami peraturan yang berlaku dan dapat mengimplementasikannya dengan baik. Tanpa dukungan yang memadai, pelaku UMKM mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kalurahan untuk menciptakan sistem yang

tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan edukasi dan bimbingan bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat beroperasi secara legal dan berkelanjutan tanpa menimbulkan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Hal ini juga disampaikan lanjut oleh Pak Basuki Purnomo dalam hal peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:

“ Kalau soal izin usaha kami dibantu oleh pihak pemerintah kalurahan, kami juga dibantu dalam ketika mengurus BPOM nya mas, dari kalurahan juga mengatur sistem pengawasan dan kebersihan mas (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM, 29/08/2024).”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah kalurahan sangat krusial dalam proses pengurusan izin usaha. Bantuan ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pendampingan dalam memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan izin dari BPOM. Dengan adanya interaksi langsung dengan pihak kalurahan, proses yang biasanya kompleks menjadi lebih terarah dan efisien, meminimalkan risiko kesalahan yang dapat menghambat pengembangan usaha.

Selain itu, pengaturan sistem pengawasan dan kebersihan yang dilakukan oleh kalurahan mencerminkan komitmen terhadap standar kesehatan dan keselamatan. Hal ini penting, terutama dalam industri yang berhubungan dengan makanan atau produk kesehatan, di mana kebersihan dan keamanan menjadi faktor utama yang menentukan kepercayaan konsumen. Dengan adanya pengawasan yang terstruktur, usaha dapat lebih percaya diri dalam menjamin kualitas produk yang ditawarkan.

Dukungan ini juga menciptakan sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan iklim investasi di daerah tersebut. Ketika pelaku usaha merasa didukung dan memperoleh bimbingan yang tepat, mereka lebih

termotivasi untuk berkembang dan berinovasi. Ini tidak hanya menguntungkan bagi individu pelaku usaha, tetapi juga bagi perekonomian lokal secara keseluruhan.

Hal ini juga di sampaikan lanjut oleh Ibu Puji Lestari dalam hal peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:

“ Kami dibantu kalau urus soal izin usaha dan juga kalau urus BPOM nya dan juga kalau pengawasan kebersihan dan keamanan ada juga mas (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM, 29/08/2024).”

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa dukungan dalam pengurusan izin usaha dan BPOM sangat penting bagi pelaku usaha, mempermudah mereka dalam memenuhi regulasi yang kompleks. Selain itu, adanya pengawasan terhadap kebersihan dan keamanan menunjukkan komitmen untuk memastikan kualitas produk, yang vital dalam industri yang berhubungan dengan kesehatan dan makanan. Bantuan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi lokal melalui sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah.

## B. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Peran Pemerintah Kalurahan

Peran pemerintah kalurahan dalam meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat efektivitasnya. Faktor-faktor yang mendukung peran pemerintah kalurahan termasuk adanya komitmen dan dukungan politik dari tingkat yang lebih tinggi, seperti pemerintah daerah dan pusat. Ketika kebijakan yang pro-UMKM ditetapkan dan didukung secara konsisten, pelaku UMKM akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam program-program yang ada. Selain itu, dukungan dari berbagai lembaga, baik itu lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, maupun sektor swasta, juga sangat penting.

Kerjasama ini dapat memperluas akses pelaku UMKM terhadap informasi, pelatihan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk pengembangan usaha.

Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih di tingkat kalurahan juga merupakan faktor pendukung yang signifikan. Jika pemerintah memiliki staf yang kompeten dan memahami kebutuhan pelaku UMKM, mereka akan lebih efektif dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung. Selain itu, tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya UMKM juga berperan. Jika masyarakat memahami manfaat dari pengembangan UMKM, mereka akan lebih aktif berpartisipasi dalam program yang ditawarkan.

Namun, ada juga faktor-faktor yang menghambat peran pemerintah kalurahan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya. Banyak kalurahan yang menghadapi masalah finansial, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk menyediakan dukungan yang memadai bagi pelaku UMKM. Selain itu, birokrasi yang rumit juga dapat menjadi penghalang. Proses perizinan yang panjang dan sulit sering kali membuat pelaku UMKM enggan untuk menjalani prosedur formal, sehingga mereka cenderung beroperasi di sektor informal.

Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan juga menjadi kendala. Jika pemerintah kalurahan tidak dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pihak lain, maka program yang dirancang bisa menjadi tidak terarah atau bahkan tumpang tindih. Selain itu, resistensi terhadap perubahan di kalangan pelaku UMKM bisa menjadi penghalang bagi inovasi. Beberapa pelaku usaha mungkin merasa nyaman dengan metode tradisional dan enggan mencoba pendekatan baru yang diperkenalkan oleh pemerintah. Dengan memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat ini,

pemerintah kalurahan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan UMKM. Upaya untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan menyederhanakan proses administrasi akan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.

### **1. Sebagai fasilitator**

Peran pemerintah kalurahan dalam meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat kinerja mereka. Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, pemerintah kalurahan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses kepada pelaku UMKM terhadap informasi, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan. Faktor yang mendukung peran ini sering kali berasal dari adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan lembaga lain, seperti organisasi non-pemerintah atau lembaga pendidikan. Ketersediaan program pelatihan yang relevan dan mudah diakses juga akan mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan keterampilan mereka.

Namun, tantangan yang dihadapi bisa sangat signifikan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kalurahan. Ketika dana dan fasilitas yang tersedia tidak mencukupi, upaya untuk memfasilitasi pelaku UMKM menjadi terhambat. Selain itu, kurangnya pemahaman atau kesadaran di kalangan pelaku UMKM tentang pentingnya pelatihan dan informasi yang ditawarkan juga dapat menjadi penghalang. Jika masyarakat tidak merespons positif terhadap inisiatif pemerintah, maka program-program tersebut tidak akan efektif.

Berdasarkan pemikiran di atas hal ini di sampaikan oleh Pak Samsuri menanggapi dalam hal faktor yang mendukung dan penghambat pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM:

“ Paling kesulitan kami sebagai pemerintah kalurahan itu di keterbatasan wawasan manajemen teknis usaha, keterbatasan akses permodalan dan pendanaan, dan juga keterbatasan jaringan dan kemitraan. Tapi yang jadi faktor pendukung kami pemerintah kalurahan sebagai fasilitator karena adanya pasar-pasar bagi hasil produk UMKM (hasil wawancara bersama Pak Lurah, 30/08/2024)”.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan menghadapi beberapa tantangan utama dalam pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pertama, keterbatasan wawasan manajemen teknis usaha menjadi penghambat dalam pengembangan kapasitas pengelola UMKM. Hal ini mungkin mengakibatkan kurangnya strategi yang efektif dalam menjalankan dan mengembangkan usaha, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Selain itu, akses terhadap permodalan dan pendanaan juga menjadi masalah signifikan. Keterbatasan ini dapat membatasi potensi pertumbuhan UMKM, karena mereka tidak memiliki cukup modal untuk investasi atau pengembangan produk. Tanpa dukungan finansial yang memadai, usaha-usaha ini mungkin kesulitan untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

Keterbatasan jaringan dan kemitraan juga menambah kompleksitas situasi. Jaringan yang kuat penting untuk pertukaran informasi, kolaborasi, dan akses ke pasar yang lebih luas. Tanpa jaringan yang memadai, UMKM mungkin terisolasi dan kehilangan peluang untuk berkembang.

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan, yaitu peran pemerintah kalurahan sebagai fasilitator. Adanya pasar-pasar bagi hasil produk UMKM dapat menjadi platform yang menguntungkan bagi pengusaha lokal. Dengan memanfaatkan pasar tersebut, UMKM memiliki peluang untuk memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan visibilitas produk mereka.

Hal ini juga disampaikan lanjut oleh Ibu Puji Lestari menanggapi dalam hal faktor yang mendukung dan penghambat pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM:

“ Hambatan terbesar kami di pemasaran dan keterbatasan modal usaha mas, dan juga hal yang jadi hambatan kami sebagai pelaku UMKM bukan hanya dimodal usaha aja mas, tapi wawasan manajemen dan teknik usaha. Tapi untungnya sekarang sudah tersedia program pendampingan dan pelatihan technical skill dan terbangunnya pasar-pasar hasil produk UMKM dan juga tersedianya skema keuangan mikro bagi pelaku UMKM yang bermodal kecil (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM, 29/08/2024)”.

Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa pelaku UMKM menghadapi beberapa hambatan utama, terutama dalam pemasaran dan keterbatasan modal usaha. Pemasaran yang efektif menjadi tantangan, karena tanpa strategi yang tepat, produk UMKM sulit untuk dikenal di pasar yang kompetitif. Keterbatasan modal juga menghambat kemampuan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, berinovasi, dan memperluas jangkauan pasar mereka.

Selain masalah pemasaran dan modal, wawasan manajemen dan teknik usaha juga menjadi kendala signifikan. Tanpa pengetahuan yang memadai dalam manajemen, pelaku UMKM mungkin kesulitan dalam merencanakan dan mengelola operasional usaha secara efisien. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan keputusan yang kurang optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja usaha.

Di sisi lain, adanya program pendampingan dan pelatihan keterampilan teknis memberikan harapan bagi pelaku UMKM. Program ini berpotensi meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka, sehingga lebih siap dalam menghadapi tantangan. Selain itu, terbentuknya pasar-pasar hasil produk UMKM dan tersedianya skema keuangan mikro memberikan akses yang lebih baik bagi pelaku usaha dengan modal kecil, menciptakan peluang untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal.

Hal ini juga di sampaikan lanjut oleh Ibu Suryanti menanggapi dalam hal faktor yang mendukung dan penghambat pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM:

“ Paling yang jadi penghambatnya itu keterbatasan modal usaha dan pemasaran mas, walaupun sekarang pemasarannya sudah bisa lewat online tapi seperti saya yang tidak paham tentang teknologi pasti susah kan mas. Tapi untungnya sekarang ada event atau pameran untuk produk UMKM jadi bisa ikut serta memarkan produk-produk yang kami buat (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM, 30/08/2024)”.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keterbatasan modal usaha dan tantangan pemasaran menjadi penghambat utama bagi pelaku UMKM. Meskipun pemasaran online kini menjadi pilihan yang dapat meningkatkan visibilitas produk, tidak semua pelaku UMKM memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi. Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan dalam memanfaatkan peluang digital yang ada, sehingga menghambat potensi pertumbuhan usaha.

Di sisi lain, adanya event atau pameran untuk produk UMKM menjadi solusi yang positif. Melalui pameran, pelaku UMKM dapat memperkenalkan dan memasarkan produk mereka secara langsung kepada konsumen. Ini tidak hanya meningkatkan peluang penjualan, tetapi juga membantu membangun jaringan dan

meningkatkan pengetahuan tentang produk, yang sangat penting dalam mengatasi tantangan pemasaran yang dihadapi.

## 2. Sebagai inovator

Dalam peran sebagai inovator, pemerintah kalurahan diharapkan dapat menciptakan ide-ide baru dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Faktor yang mendukung peran ini termasuk adanya budaya inovasi yang terbuka di kalangan pengusaha lokal. Ketika pelaku UMKM bersedia untuk bereksperimen dengan pendekatan baru dan menerima ide-ide segar, pemerintah dapat berfungsi sebagai pengarah untuk mengintegrasikan inovasi tersebut ke dalam praktik bisnis. Selain itu, dukungan dari sektor swasta dan komunitas bisnis juga menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi.

Namun, ada pula tantangan yang menghambat, seperti kurangnya akses terhadap teknologi dan informasi terkini. Banyak pelaku UMKM yang masih menggunakan metode tradisional dan tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka. Jika pemerintah kalurahan tidak mampu menyediakan akses terhadap teknologi dan pelatihan yang memadai, maka inovasi yang diharapkan sulit untuk tercapai. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari pelaku UMKM juga dapat menjadi penghalang. Jika mereka enggan untuk mencoba pendekatan baru, maka potensi inovasi yang ada tidak akan terwujud.

Berdasarkan pemikiran di atas hal ini di sampaikan oleh Pak Agung Murdianto menanggapi dalam hal faktor yang mendukung dan penghambat pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM:

“ Paling hambatan kami pemerintah kalurahan sebagai inovator karena kurangnya akses informasi terkini tentang tren pasar dan teknologi dan juga keterbatasan SDM yang terampil dalam desain produk dan manajemen inovasi. Mungkin yang jadi faktor pendukung kami sebagai inovator, dengan adanya digital dan teknologi mungkin bisa mempermudah pelaku UMKM untuk belajar berinovasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada ditambah pelatihan-pelatihan yang di fasilitasi oleh pemerintah kalurahan, mungkin bisa mempermudah pelaku UMKM dalam berinovasi (hasil wawancara bersama Pak Carik, 29/08/2024)”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan menghadapi hambatan dalam perannya sebagai inovator, terutama terkait dengan akses informasi terkini mengenai tren pasar dan teknologi. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam memberikan arahan yang tepat dan strategi yang efektif untuk mendukung pelaku UMKM. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam desain produk dan manajemen inovasi juga menjadi tantangan, mengingat inovasi memerlukan keterampilan khusus yang tidak semua pelaku UMKM miliki.

Namun, ada faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan, yaitu kemajuan dalam teknologi digital. Teknologi ini menawarkan peluang bagi pelaku UMKM untuk belajar dan berinovasi lebih mudah. Dengan akses yang lebih baik terhadap informasi dan sumber daya, pelaku UMKM dapat menggali ide-ide baru dan menerapkan teknologi dalam proses produksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

Pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah kalurahan juga berperan penting dalam mendorong inovasi. Melalui program pelatihan ini, pelaku UMKM dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendesain produk yang lebih baik dan mengelola inovasi secara efektif. Dengan kombinasi akses

teknologi dan pelatihan yang tepat, pemerintah kalurahan dapat membantu pelaku UMKM untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan mereka,

Hal ini juga disampaikan lanjut oleh Ibu Puji Lestari menanggapi dalam hal faktor yang mendukung dan penghambat pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM:

“ Dengan keterbatasan dana dan informasi tentang tren pasar dan juga lemahnya jejaring dan kolaborasi UMKM dengan instansi inovasi. Karena keterbatasan SDM yang terampil dalam desain produk dan manajemen inovasi. tapi untungnya sekarang sudah ada program-program pelatihan secara online maupun offline jadi bisa belajar desain produk dan berinovasi untuk membuat produk-produk UMKM yang baru (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM, 29/08/2024)”.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa keterbatasan dana dan informasi tentang tren pasar menjadi kendala besar bagi UMKM dalam berinovasi. Tanpa akses yang cukup terhadap data pasar yang relevan, pelaku UMKM mungkin kesulitan dalam mengidentifikasi peluang baru dan menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, lemahnya jaringan dan kolaborasi dengan instansi inovasi juga menghambat pertukaran pengetahuan dan sumber daya yang dapat mempercepat proses inovasi.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam desain produk dan manajemen inovasi turut memperburuk situasi ini. Tanpa keterampilan yang memadai, pelaku UMKM mungkin mengalami kesulitan dalam menciptakan produk yang menarik dan kompetitif. Hal ini dapat mengakibatkan stagnasi dalam pengembangan produk dan kurangnya daya saing di pasar yang semakin kompetitif.

Namun, adanya program-program pelatihan, baik secara online maupun offline, memberikan harapan bagi pelaku UMKM. Program ini memungkinkan mereka untuk belajar keterampilan desain produk dan manajemen inovasi yang diperlukan untuk menciptakan produk baru. Dengan memanfaatkan pelatihan ini, pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka, yang pada gilirannya dapat memperkuat daya saing dan potensi pertumbuhan usaha mereka di pasar.

Hal ini juga disampaikan lanjut oleh Pak Agus Supardi menanggapi dalam hal faktor yang mendukung dan penghambat pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM:

“ Yang jadi penghambat untuk pelaku UMKM dalam berinovasi karena keterbatasan SDM yang terampil, lemahnya jejaring, keterbatasan dana dan kurangnya pelatihan desain produk. Tapi yang jadi faktor pendukung bagi pelaku UMKM, dengan adanya event-event produk UMKM mungkin bisa menambah wawasan dalam berinovasi (hasil wawancara bersama Masyarakat, 30/08/2024) ”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku UMKM menghadapi beberapa hambatan signifikan dalam upaya mereka untuk berinovasi. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil menjadi salah satu penghambat utama, mengingat inovasi memerlukan keterampilan khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pelaku UMKM. Selain itu, lemahnya jejaring antar pelaku usaha juga mengurangi peluang untuk kolaborasi dan pertukaran ide, yang penting dalam proses inovasi. Keterbatasan dana dan kurangnya pelatihan desain produk semakin memperburuk situasi, membatasi kemampuan UMKM untuk menciptakan produk yang kompetitif dan relevan di pasar.

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Adanya event-event yang memfokuskan pada produk UMKM memberikan platform bagi pelaku usaha untuk belajar dan berbagi pengalaman. Event tersebut tidak hanya memungkinkan pelaku UMKM untuk memamerkan produk mereka, tetapi juga menjadi ajang untuk mendapatkan inspirasi dan wawasan baru mengenai tren pasar dan inovasi. Melalui interaksi di event ini, pelaku UMKM dapat memperluas jaringan mereka dan menemukan potensi kolaborasi dengan pihak lain.

Dengan memanfaatkan peluang yang ada di event-event tersebut, pelaku UMKM dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan mengatasi beberapa hambatan yang dihadapi. Ini dapat membuka jalan bagi pengembangan produk yang lebih inovatif dan relevan, sekaligus memperkuat daya saing mereka di pasar. Dengan dukungan yang tepat, pelaku UMKM memiliki potensi untuk tumbuh dan beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

### **3. Sebagai dinamisator**

Sebagai dinamisator, pemerintah kalurahan berperan dalam membangkitkan semangat dan partisipasi pelaku UMKM untuk berkembang. Faktor-faktor yang dapat mendukung peran ini meliputi kemampuan pemerintah untuk membangun hubungan yang baik dengan komunitas. Ketika pemerintah dapat menjalin komunikasi yang efektif dan transparan, masyarakat akan lebih cenderung untuk terlibat dalam program-program yang ditawarkan. Selain itu, adanya pemimpin yang inspiratif di kalangan pemerintah kalurahan juga dapat mendorong pelaku UMKM untuk aktif berpartisipasi.

Namun, hambatan sering kali muncul dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak mendengarkan

aspirasi mereka atau tidak memahami kebutuhan mereka, maka semangat untuk berpartisipasi bisa menurun. Selain itu, faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, juga dapat mempengaruhi motivasi pelaku UMKM. Ketika mereka menghadapi tekanan ekonomi, fokus mereka mungkin lebih pada bertahan hidup daripada berpartisipasi dalam program pengembangan.

Berdasarkan pemikiran di atas hal ini di sampaikan oleh Pak Samsuri menanggapi dalam hal faktor yang mendukung dan penghambat pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM:

“ Yang jadi penghambat mungkin karena kurangnya koordinasi antara pelaku UMKM dan pemerintah kalurahan, dan juga minimnya mengenai peluang usaha baru dan pasar ekspor. Tapi yang menjadi faktor pendukungnya dengan terselenggaranya pameran produk rutin untuk meningkatkan jaringan pemasaran (hasil wawancara bersama Pak Lurah, 30/08/2024)”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara pelaku UMKM dan pemerintah kalurahan menjadi penghambat utama dalam pengembangan usaha. Tanpa komunikasi yang efektif, pelaku UMKM mungkin tidak mendapatkan dukungan dan informasi yang diperlukan untuk beradaptasi dan berinovasi. Selain itu, minimnya pengetahuan tentang peluang usaha baru dan pasar ekspor dapat membatasi visi pelaku UMKM, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan.

Namun, terdapat faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Terselenggaranya pameran produk secara rutin memberikan platform bagi pelaku UMKM untuk memamerkan produk mereka dan menjalin jaringan pemasaran yang lebih luas. Event ini tidak hanya meningkatkan visibilitas

produk, tetapi juga memungkinkan pelaku UMKM untuk berinteraksi langsung dengan calon pembeli, distributor, dan mitra potensial, yang dapat memperkuat posisi mereka di pasar.

Dengan memanfaatkan pameran produk ini, pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk belajar tentang tren pasar dan mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi dengan pihak lain. Hal ini dapat membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih baik antara pelaku UMKM dan pemerintah kalurahan, sehingga memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih baik. Dengan dukungan yang tepat dan peningkatan koordinasi, pelaku UMKM dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Hal ini juga di sampaikan lanjut oleh Pak Basuki Purnomo menanggapi dalam hal faktor yang mendukung dan penghambat pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM:

“ Yang jadi penghambatnya karena minimnya informasi mengenai peluang usaha baru dan pasar ekspor, infrastruktur dan fasilitas yang belum memadai untuk mendukung perkembangan UMKM. Dan yang jadi faktor pendukungnya dengan adanya pameran produk untuk meningkatkan jaringan pemasaran dan menemukan mitra bisnis (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM, 29/08/2024)”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku UMKM menghadapi beberapa hambatan signifikan, terutama terkait minimnya informasi mengenai peluang usaha baru dan pasar ekspor. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang pasar internasional dan potensi yang ada, pelaku UMKM mungkin kesulitan untuk merancang strategi ekspansi yang efektif. Selain itu, infrastruktur dan fasilitas yang belum memadai juga

menghambat perkembangan usaha, mengingat akses yang buruk dapat membatasi distribusi produk dan mengurangi efisiensi operasional.

Di sisi lain, adanya pameran produk menjadi faktor pendukung yang penting bagi pelaku UMKM. Pameran ini tidak hanya menyediakan platform untuk memamerkan produk, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan jaringan pemasaran. Melalui interaksi langsung dengan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya, pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan pasar mereka dan menemukan mitra bisnis yang potensial, yang sangat penting untuk pertumbuhan usaha.

Dengan memanfaatkan pameran produk, pelaku UMKM dapat mendapatkan wawasan baru tentang tren pasar dan kebutuhan konsumen, yang dapat membantu mereka berinovasi dan beradaptasi. Selain itu, pengalaman yang diperoleh dari pameran dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam menjajaki pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor. Dengan dukungan yang tepat dan kesempatan untuk berinteraksi, pelaku UMKM memiliki potensi untuk mengatasi hambatan yang ada dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan.

Hal ini juga disampaikan lanjut oleh Ibu Wahyuni Ertiana menanggapi dalam hal faktor yang mendukung dan penghambat pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM:

“Kurangnya komunikasi antara pelaku UMKM dan pemerintah kalurahan dan fasilitas yang belum memadai untuk mendukung perkembangan UMKM. Yang jadi faktor pendukung dengan adanya program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM lewat pelatihan (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM, 30/08/2024)”.

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa kurangnya komunikasi antara pelaku UMKM dan pemerintah kalurahan menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha. Tanpa adanya saluran komunikasi yang efektif, pelaku UMKM mungkin tidak mendapatkan informasi dan dukungan yang diperlukan untuk mengoptimalkan potensi mereka. Selain itu, fasilitas yang belum memadai juga menghambat perkembangan UMKM, karena akses yang terbatas dapat mengurangi efisiensi operasional dan kapasitas produksi.

Di sisi lain, adanya program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan memberikan harapan bagi pelaku UMKM. Program ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berinovasi dan bersaing di pasar. Dengan pelatihan yang tepat, pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis mereka, sehingga lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Kombinasi antara dukungan pelatihan dan peningkatan komunikasi dengan pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pertumbuhan UMKM.

#### **4. Sebagai organisator**

Dalam kapasitasnya sebagai organisator, pemerintah kalurahan harus mampu mengelola dan menyusun berbagai kegiatan yang mendukung UMKM. Faktor yang mendukung di sini termasuk ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan sistem yang baik dalam pengelolaan program. Jika pemerintah memiliki tim yang kompeten dan terlatih, mereka akan lebih mampu mengelola kegiatan dengan efisien. Selain itu, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyelenggaraan

pameran atau bazar untuk UMKM juga dapat meningkatkan visibilitas dan peluang usaha mereka.

Namun, tantangan yang dihadapi sering kali terkait dengan kurangnya koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan. Jika pemerintah tidak dapat bersinergi dengan pihak lain, maka kegiatan yang direncanakan bisa menjadi tidak terarah atau bahkan tumpang tindih. Selain itu, keterbatasan dalam pengelolaan waktu dan sumber daya juga dapat menghambat pemerintah dalam melaksanakan program-program yang dirancang.

Berdasarkan pemikiran di atas hal ini disampaikan oleh Pak Agung Murdianto menanggapi dalam hal faktor yang mendukung dan penghambat pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM:

“ Yang menjadi penghambat kami pemerintah kalurahan sebagai organisator, karena program pengembangan UMKM secara terecana dan terpadu belum terselenggara, dan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengembangan UMKM. Yang jadi faktor pendukung dengan dibentuknya kelembagaan pengembangan UMKM seperti koperasi dan kelompok tani (hasil wawancara bersama Pak Carik, 29/08/2024)”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan menghadapi beberapa kendala dalam melaksanakan program pengembangan UMKM secara terencana dan terpadu. Salah satu penghambat utama adalah kurangnya infrastruktur dan sarana penunjang yang memadai. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, sulit bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi lokal menjadi terhambat.

Di sisi lain, terbentuknya kelembagaan pengembangan UMKM, seperti koperasi dan kelompok tani, memberikan dukungan yang signifikan. Kelembagaan ini berfungsi sebagai wadah untuk mengorganisir pelaku UMKM, memfasilitasi pertukaran informasi, serta menyediakan akses ke sumber daya yang dibutuhkan. Dengan adanya koperasi, pelaku UMKM dapat saling mendukung dalam hal pemasaran dan pengadaan bahan baku, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing usaha mereka.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi, keberadaan kelembagaan yang telah dibentuk menjadi pilar penting dalam pengembangan UMKM di kalurahan. Upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan sarana penunjang harus menjadi prioritas agar program pengembangan UMKM dapat berjalan lebih efektif. Dengan sinergi antara pemerintah dan kelembagaan yang ada, diharapkan pengembangan UMKM dapat lebih terencana dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Hal ini juga disampaikan lanjut oleh Ibu Muji Lestari menanggapi dalam hal faktor yang mendukung dan penghambat pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM:

“ Yang jadi penghambat, karena koordinasi yang belum maksimal antar lembaga UMKM dan pemerintah kalurahan. Dan juga belum terselenggaranya program pengembangan UMKM secara terencana dan terpadu. Mungkin yang jadi faktor pendukung, dengan tersedianya sarana kolaborasi antar UMKM dan terbentuknya lembaga pengembangan UMKM seperti koperasi (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM sekaligus ketua RT 07 Padukuhan Mengger, 29/08/2024)”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penghambat utama dalam pengembangan UMKM di kalurahan adalah kurangnya koordinasi yang maksimal antara lembaga UMKM dan pemerintah. Ketidakharmonisan ini mengakibatkan program-program

yang dirancang tidak dapat dilaksanakan secara terencana dan terpadu. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, potensi kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak menjadi terabaikan, sehingga dampaknya adalah pelaksanaan program yang tidak optimal dan hasil yang kurang memuaskan bagi pelaku UMKM.

Di sisi lain, tersedianya sarana kolaborasi antar UMKM menjadi faktor pendukung yang penting. Dengan adanya ruang atau platform untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman, pelaku UMKM dapat saling memperkuat dan berbagi pengetahuan tentang praktik terbaik dalam usaha mereka. Selain itu, terbentuknya lembaga pengembangan UMKM, seperti koperasi, berfungsi sebagai struktur yang mampu mendukung pelaku usaha dalam berbagai aspek, termasuk pemasaran dan akses ke modal. Keberadaan lembaga ini dapat meningkatkan keterikatan antar pelaku UMKM dan menciptakan ekosistem yang lebih kondusif untuk pertumbuhan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan signifikan dalam koordinasi, potensi pengembangan UMKM tetap ada melalui sarana kolaborasi dan kelembagaan yang kuat. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, penting bagi semua pihak untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama, sehingga program pengembangan dapat dilaksanakan dengan lebih terencana dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan lembaga UMKM akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Hal ini juga disampaikan lanjut oleh Ibu Puji Lestari menanggapi dalam hal faktor yang mendukung dan penghambat pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM:

“ Penghambat karena koordinasi yang belum maksimal antar lembaga UMKM dan pemerintah kalurahan, dan juga belum terkelolanya basis data UMKM secara akurat. Mungkin faktor pendukungnya dengan tersedianya sarana kolaborasi dan kegiatan promosi seperti pameran dan studi banding (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM, 29/08/2024)”.

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa penghambat utama dalam pengembangan UMKM di kalurahan adalah kurangnya koordinasi yang maksimal antara lembaga UMKM dan pemerintah. Ketidakselarasan ini berdampak pada pengelolaan basis data UMKM yang belum terkelola secara akurat, sehingga informasi penting mengenai pelaku usaha dan potensi mereka sulit diakses. Tanpa data yang jelas, perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan UMKM menjadi kurang efektif, mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan pelaku usaha.

Namun, terdapat faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan, seperti tersedianya sarana kolaborasi dan kegiatan promosi, termasuk pameran dan studi banding. Sarana kolaborasi memungkinkan pelaku UMKM untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik, sementara kegiatan promosi seperti pameran dapat meningkatkan visibilitas produk-produk lokal. Dengan memanfaatkan kedua aspek ini, diharapkan sinergi antara lembaga UMKM dan pemerintah dapat ditingkatkan, serta mendorong pertumbuhan yang lebih signifikan bagi sektor UMKM di kalurahan.

## 5. Sebagai regulator

Sebagai regulator, pemerintah kalurahan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menegakkan kebijakan yang mendukung UMKM. Faktor yang mendukung di sini adalah adanya dukungan politik dari tingkat yang lebih tinggi, seperti pemerintah pusat atau daerah. Ketika kebijakan yang mendukung UMKM diterapkan secara konsisten, pelaku UMKM akan merasa lebih aman dalam

berinvestasi dan mengembangkan usaha mereka. Selain itu, keberadaan regulasi yang memudahkan perizinan dan akses kepada modal juga akan sangat membantu.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam peran ini sering kali berkaitan dengan kompleksitas regulasi dan birokrasi. Jika proses perizinan terlalu rumit atau memakan waktu, pelaku UMKM akan merasa frustrasi dan cenderung menghindari formalitas yang diperlukan. Selain itu, kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan regulasi juga dapat mengakibatkan penyalahgunaan atau ketidakadilan, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan UMKM.

Berdasarkan pemikiran di atas hal ini di sampaikan oleh Pak Agung Murdianto menanggapi dalam hal faktor yang mendukung dan penghambat pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM:

“ Yang jadi penghambat kami selama ini,dengan tidak adanya peraturan teknis terkait penyelenggaraan kegiatan UMKM dan juga pemantauan dan evaluasi yang kurang maksimal. Yang jadi faktor pendukung dengan adanya kebijakan yang pro UMKM seperti fasilitas perizinan (hasil wawancara bersama Pak Carik, 29/08/2024)”.

Hasil wawancara ini ada dua aspek penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): hambatan yang dihadapi serta faktor pendukung yang ada. Hambatan utama yang disebutkan adalah ketiadaan peraturan teknis yang jelas mengenai penyelenggaraan kegiatan UMKM. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, yang mungkin bingung tentang prosedur dan regulasi yang harus diikuti. Ketidakjelasan ini tidak hanya menghambat keputusan bisnis, tetapi juga mengurangi motivasi pengusaha untuk berinovasi dan berkembang.

Selain itu, kurangnya pemantauan dan evaluasi yang maksimal menambah kompleksitas masalah. Tanpa adanya sistem yang efisien untuk mengevaluasi kebijakan dan dampaknya, sulit untuk mengetahui apakah inisiatif yang ada sudah efektif atau perlu disesuaikan. Hal ini dapat menyebabkan stagnasi dalam pengembangan UMKM, karena pelaku usaha tidak mendapatkan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk membangun mekanisme yang lebih baik dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan yang berhubungan dengan UMKM.

Di sisi lain, keberadaan kebijakan yang pro-UMKM, seperti kemudahan dalam fasilitas perizinan, menjadi faktor pendukung yang signifikan. Kebijakan ini dapat memberikan dorongan bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha mereka secara resmi, yang pada gilirannya membuka akses ke berbagai sumber daya dan dukungan pemerintah. Dengan perizinan yang lebih sederhana, pelaku UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan pasar, sehingga meningkatkan daya saing mereka. Kebijakan yang mendukung ini menunjukkan bahwa ada kesadaran dari pemerintah akan pentingnya sektor UMKM dalam perekonomian.

Hal ini juga di sampaikan lanjut oleh Pak Basuki Purnomo menanggapi dalam hal faktor yang mendukung dan penghambat pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM:

“ Salah satu penghambat kami, kurangnya pemantauan atau monitoring dari pihak pemerintah kalurahan dan juga kebijakan perkembangan UMKM dari pemerintah kalurahan yang belum berjalan dengan baik. Kurangnya partisipasi pelaku UMKM dalam penyusunan kebijakan tentang UMKM (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM, 30/08/2024) ”.

Hasil wawancara ini mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat kalurahan. Salah satu penghambat yang paling mencolok adalah kurangnya pemantauan atau monitoring dari pihak pemerintah kalurahan. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, kebijakan yang telah ditetapkan mungkin tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga pelaku UMKM tidak merasakan manfaat dari program-program yang seharusnya mendukung mereka. Hal ini bisa menyebabkan kebijakan menjadi tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Selain itu, pernyataan tentang kebijakan perkembangan UMKM yang belum berjalan dengan baik menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap upaya pemerintah dalam mendukung sektor ini. Kebijakan yang tidak efektif dapat mengurangi kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah, yang pada gilirannya dapat menghambat partisipasi mereka dalam berbagai program yang ditawarkan. Jika pelaku UMKM merasa bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif, mereka mungkin enggan untuk terlibat lebih jauh, menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Kurangnya partisipasi pelaku UMKM dalam penyusunan kebijakan juga menjadi sorotan penting. Ketidaklibatan ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelaku usaha. Tanpa input dari mereka yang langsung terlibat dalam sektor ini, kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak efektif dan tidak dapat mengatasi tantangan yang dihadapi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif, di mana suara pelaku UMKM didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kalurahan dan pelaku UMKM. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM, diperlukan sistem pemantauan yang lebih baik dan kebijakan yang responsif terhadap realitas di lapangan. Dengan melibatkan pelaku usaha dalam penyusunan kebijakan, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat lebih relevan dan efektif, sehingga dapat mendorong perkembangan sektor UMKM secara berkelanjutan. Dialog yang terbuka dan konstruktif antara semua pihak akan sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Hal ini juga disampaikan lanjut oleh Ibu Nurhidayati menanggapi dalam hal faktor yang mendukung dan penghambat pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM:

“ Saya melihat selama ini yang menjadi penghambat yaitu karena kurangnya partisipasi dari kami selaku pelaku UMKM, dan juga tidak adanya peraturan teknis terkait penyelenggaraan UMKM. Mungkin yang jadi faktor pendukung kami selaku pelaku UMKM dengan adanya kebijakan dari pemerintah kalurahan seperti fasilitas perizinan, bisa mempermudah kami dalam menjalankan usaha pengembangan produk baru tentang UMKM (hasil wawancara bersama anggota pelaku UMKM, 30/08/2024)”.

Hasil wawancara ini terlihat bahwa ada tantangan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta faktor-faktor yang dapat mendukung perkembangan mereka. Salah satu penghambat utama yang diidentifikasi adalah kurangnya partisipasi dari pelaku UMKM dalam proses pengambilan keputusan. Ketidaklibatan ini dapat menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang dihadapi pelaku usaha. Tanpa adanya kontribusi dari mereka yang

langsung terlibat, kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak efektif dan gagal untuk mengatasi masalah yang ada di lapangan.

Di samping itu, ketiadaan peraturan teknis yang jelas terkait penyelenggaraan UMKM menjadi hambatan signifikan. Peraturan yang tidak jelas dapat menciptakan kebingungan di kalangan pelaku usaha mengenai prosedur dan ketentuan yang harus diikuti. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan diri pelaku UMKM dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan terarah, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah memahami dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjalankan usaha mereka secara efektif.

Namun, terdapat faktor pendukung yang positif, yaitu adanya kebijakan dari pemerintah kalurahan yang menyediakan fasilitas perizinan. Kebijakan ini dianggap mempermudah pelaku UMKM dalam menjalankan usaha dan mengembangkan produk baru. Dengan proses perizinan yang lebih sederhana, pelaku UMKM dapat lebih fokus pada inovasi dan pengembangan usaha, tanpa terhambat oleh birokrasi yang rumit. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang pro-UMKM sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan berkaitan dengan topik penelitian Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih kurang optimal atau maksimal.

1. Peran pemerintah kalurahan dalam meningkatkan UMKM sebagai berikut:
  - 1) Sebagai fasilitator, pemerintah kalurahan memberikan fasilitas pelatihan yang mencakup inovasi produk, pemasaran digital, serta pengemasan dalam 3-6 bulan sekali dan diberikan hanya bersifat singkat. Pemerintah kalurahan juga memfasilitasi akses informasi pasar dan peluang usaha baru kepada pelaku UMKM.
  - 2) Sebagai inovator, pemerintah kalurahan dapat menyediakan ruang atas fasilitas yang mendukung pengembangan ide-ide baru untuk mendorong kreativitas pelaku UMKM dalam menciptakan produk baru, dan menyediakan infrastruktur yang mendukung inovasi.
  - 3) Sebagai dinamisator, pemerintah kalurahan memberikan fasilitas akses informasi pasar dan peluang usaha baru kepada pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah kalurahan sering melakukan pendataan dan pemantauan terhadap seluruh pelaku UMKM dikalurahan Nglipar tujuannya agar pemerintah dapat memfasilitasi kebutuhan para pelaku UMKM.

- 4) Sebagai organisator, pemerintah kalurahan melakukan berbagai program untuk mendukung pertumbuhan UMKM diwilayahnya. salah satunya adalah memberikan informasi terkini mengenai program-program terbaru untuk UMKM. Pemerintah kalurahan juga membantu pelaku UMKM memperoleh berbagai izin usaha seperti nomor induk berusaha (NIB) dan surat izin usaha kesehatan (SIUK). Selain itu, pemerintah kalurahan juga memfasilitasi pendataan dan pendaftaran pelaku UMKM agar dapat mengetahui kondisi terkini industri kecil di kalurahan tersebut. namun, menurut salah satu pelaku UMKM, mengatakan bahwa pemantauan dari pemerintah kalurahan terhadap pelaku UMKM masih kurang maksimal.
- 5) Sebagai regulator, pemerintah kalurahan melakukan berbagai upaya untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayahnya. Baru-baru ini, mereka menerbitkan izin usaha bagi pelaku UMKM sesuai peraturan daerah. Selain itu, pemerintah kalurahan juga membantu mengurus perijinan lingkungan bagi usaha yang berpotensi polusi seperti kerajinan kayu, pabrik tempe, laundry, dan bakpia. salah satu pelaku UMKM mengakui bahwa pemerintah kalurahan membantu mengurus izin usaha maupun perijinan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bagi usahanya, ia juga mengapresiasi sistem pengawasan dan kebersihan yang diatur oleh pemerintah kalurahan.

## 2. Faktor pendukung

- 1) Faktor pendukung pemerintah kalurahan sebagai fasilitator dalam meningkatkan UMKM adalah, Meskipun pelaku UMKM menghadapi berbagai hambatan, ada beberapa faktor pendukung yang membantu mereka dalam menjalankan usaha. Pak lurah juga menyoroti peran pemerintah kalurahan sebagai fasilitator, yang

berkontribusi melalui penyediaan pasar bagi hasil produk UMKM. Hal ini menciptakan peluang bagi pelaku usaha untuk menjual produk mereka secara lebih efektif.

- 2) Faktor pendukung pemerintah kalurahan sebagai inovator dalam meningkatkan UMKM adalah, Meskipun pelaku UMKM menghadapi berbagai hambatan dalam berinovasi, terdapat sejumlah faktor pendukung yang dapat membantu mereka mengatasi tantangan ini. dengan adanya teknologi digital menjadi katalisator yang signifikan. Pak Carik selaku pemerintah kalurahan juga menyoroti bahwa teknologi mempermudah akses informasi dan memungkinkan pelaku UMKM untuk belajar berinovasi. dengan pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah kalurahan, pelaku UMKM dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan produk mereka.
- 3) Faktor pendukung pemerintah kalurahan sebagai dinamisator dalam meningkatkan UMKM adalah, Pameran produk yang diselenggarakan secara rutin menjadi salah satu faktor utama. Pameran ini tidak hanya meningkatkan jaringan pemasaran, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas. Melalui pameran, pelaku UMKM dapat menemukan mitra bisnis yang potensial, sehingga memperluas peluang usaha dan kolaborasi.
- 4) Faktor pendukung pemerintah kalurahan sebagai organisator dalam meningkatkan UMKM adalah, Faktor pendukung bagi pengembangan UMKM, berdasarkan pernyataan dari narasumber yang diteliti oleh peneliti. Pemerintah kalurahan terfokus pada pembentukan kelembagaan dan sarana kolaborasi yang mendukung.

Pembentukan kelembagaan seperti koperasi dan kelompok tani menjadi faktor penting. Kelembagaan ini tidak hanya memberikan struktur yang jelas bagi pelaku UMKM, tetapi juga menciptakan wadah untuk berbagi sumber daya, informasi, dan pengalaman. Dengan adanya koperasi, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses modal, melakukan pembelian bahan baku secara kolektif, dan memperluas jaringan pemasaran.

Dengan adanya dukungan dari kelembagaan yang kuat, sarana kolaborasi, dan kegiatan promosi, pelaku UMKM memiliki landasan yang lebih baik untuk berkembang dan menghadapi tantangan yang ada. Hal ini menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi pertumbuhan UMKM di kalurahan.

- 5) Faktor pendukung pemerintah kalurahan sebagai regulator dalam meningkatkan UMKM adalah, kebijakan yang pro UMKM menjadi salah satu faktor utama yang mendukung perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan ini mencakup berbagai inisiatif dari Pemerintah kalurahan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku UMKM. Dengan adanya kebijakan tersebut, pelaku UMKM mendapatkan akses yang lebih baik terhadap berbagai fasilitas yang dapat membantu mereka dalam menjalankan usaha.

Fasilitas perizinan yang dipermudah menjadi aspek penting lainnya. Dengan adanya sistem perizinan yang lebih sederhana dan transparan, pelaku UMKM dapat lebih mudah memenuhi syarat-syarat legalitas usaha mereka. hal ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga memberikan kepercayaan diri bagi pelaku UMKM untuk berinovasi dan mengembangkan produk baru.

### 3. Faktor penghambat

- 1) Faktor penghambat pemerintah kalurahan sebagai fasilitator dalam meningkatkan UMKM adalah, Pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan wawasan dan pengetahuan manajemen teknis. Pak lurah kalurahan nglipar menekankan bahwa pemahaman yang kurang dalam manajemen usaha menjadi kendala signifikan bagi pelaku UMKM. Selain itu, keterbatasan akses terhadap permodalan dan pendanaan juga menjadi hambatan, yang menghalangi mereka untuk mengembangkan usaha lebih jauh.
- 2) Faktor penghambat pemerintah kalurahan sebagai inovator dalam meningkatkan UMKM adalah, Yang menjadi faktor penghambat bagi pelaku UMKM dalam berinovasi, karena kurangnya akses informasi terkini mengenai tren pasar dan teknologi menjadi salah satu hambatan utama. Tanpa informasi yang memadai, pelaku UMKM kesulitan untuk memahami perubahan pasar dan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Dan juga karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil menjadi salah satu penghambat yang signifikan. Tanpa SDM yang kompeten, pelaku UMKM akan kesulitan dalam mengembangkan produk baru yang inovatif dan memenuhi standar pasar. Hal ini menjadi faktor penghambat mereka dalam berinovasi dan menciptakan produk yang relevan.
- 3) Faktor penghambat pemerintah kalurahan sebagai dinamisator dalam meningkatkan UMKM adalah, karena kurangnya koordinasi antara pelaku UMKM dan pemerintah kalurahan menjadi hambatan signifikan. ketidakjelasan dalam

komunikasi dan kerjasama mengakibatkan pelaku UMKM tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha. Dan juga dikarenakan minimnya informasi mengenai peluang usaha baru dan pasar ekspor juga menjadi penghalang. banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui potensi pasar yang lebih luas, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan produk mereka.

- 4) Faktor penghambat pemerintah kalurahan sebagai organisator dalam meningkatkan UMKM adalah, karena kurangnya koordinasi antara pemerintah kalurahan dan lembaga UMKM menjadi hambatan yang signifikan. Koordinasi yang belum maksimal mengakibatkan program-program pengembangan UMKM tidak berjalan dengan efektif, sehingga pelaku UMKM tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka, dan juga belum terselenggaranya program pengembangan UMKM secara terencana dan terpadu hal ini juga menjadi penghalang. Tanpa adanya program yang jelas dan sistematis, pelaku UMKM kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pengembangan usaha yang efektif.
- 5) Faktor penghambat pemerintah kalurahan sebagai regulator dalam meningkatkan UMKM adalah, karena tidak adanya peraturan teknis yang jelas terkait penyelenggaraan kegiatan UMKM menjadi hambatan signifikan. Tanpa pedoman yang baku, pelaku UMKM kesulitan dalam menjalankan usaha mereka sesuai dengan standar yang diperlukan. Dan juga kurangnya pemantauan dan evaluasi dari pemerintah kalurahan juga merupakan penghalang.

## **B. SARAN**

Untuk meningkatkan peran sebagai:

1. Fasilitator

- 1) Menyelenggarakan program pelatihan yang berfokus pada keterampilan teknis dan manajerial, seperti pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan layanan pelanggan. Dan adakan program yang menghubungkan pelaku UMKM dengan mentor dari kalangan pengusaha berpengalaman.
- 2) Adakan pameran produk UMKM secara berkala untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Dan juga Bentuk kelompok diskusi atau forum bagi pelaku UMKM untuk saling berbagi pengalaman dan solusi.

2. Inovator

- 1) Fasilitasi program yang mendorong UMKM untuk melakukan riset dan pengembangan produk baru, termasuk inovasi dalam desain dan kualitas. Dan dirikan ruang kreatif yang memungkinkan UMKM untuk berkolaborasi dan berbagi ide dalam menciptakan produk baru.
- 2) Ciptakan platform yang menghubungkan UMKM dengan teknologi terbaru, seperti aplikasi manajemen usaha dan pemasaran digital. Dan juga selenggarakan pelatihan mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah operasional dan promosi produk.

3. Dinamisator

- 1) Fasilitasi jaringan dan kolaborasi antara pelaku UMKM dengan menyediakan platform atau forum yang memungkinkan mereka saling bertukar informasi dan

pengalaman. Jalin kemitraan dengan sektor swasta untuk program pengembangan UMKM yang mencakup mentoring, pelatihan, dan akses pasar.

- 2) Dorong inovasi produk dengan menyelenggarakan program riset dan pengembangan, serta memberikan bantuan pendanaan untuk UMKM yang memiliki ide-ide inovatif. Dan selenggarakan pelatihan mengenai inovasi dan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing UMKM.

#### 4. Organisator

- 1) Buat program pameran atau bazar lokal secara rutin untuk memberikan kesempatan bagi UMKM mempromosikan produk mereka. Acara ini tidak hanya meningkatkan visibilitas produk tetapi juga menciptakan interaksi langsung antara pelaku UMKM dan konsumen.

#### 5. Regulator

- 1) Penting untuk menerapkan regulasi yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual bagi produk dan inovasi yang dihasilkan oleh UMKM. Dengan adanya perlindungan ini, pelaku usaha dapat lebih percaya diri dalam berinovasi tanpa takut akan pencurian ide atau produk. Dan juga pemerintah kalurahan perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program yang ada. Dengan mengumpulkan umpan balik dari pelaku UMKM, pemerintah dapat menyesuaikan regulasi agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

### **2. Buku Dan Jurnal**

- Arora, S., & Lahiri, K. (2021). The Role Of Financial Inclusion In Enhancing The Welfare Of Society: A Perspective On Micro, Small, And Medium Enterprises. *International Journal Of Innovation, Creativity And Change*, 15(4), 147–161.
- Barr, N. (2019). Economics Of The Welfare State. Oxford University Press.
- Hartanti, W. (2021). Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan Umkm. *Indonesian Journal Of Strategic Management*, 4(1).
- Hayati, K. R., Nisak, I., Suyanto, A. T. S., & Bimantio, M. A. (2022). Peran Pemerintah Kelurahan Kebonsari Surabaya Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (Jmiap)*, 4(1), 11-16.
- Hidayat, A. (2020). Peran UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Sosial: Tinjauan Teoritis Dan Empiris. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 101– 115.
- Liana, E. (2021). *Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Nurani, H., Dwiana, E., & Eti, E. (2013). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Usaha Dan Penggunaan Informasi Terhadap Kinerja Pengambilan Keputusan Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan (Survey Pada UMKM Di Cimahi). *Journal of Social Sciences and Humanities*, 15(3).

- Sari, T. A., & Priyanti, E. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Perangkat Desa Telukjambe Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(21), 428-439.
- Smith, J. (2019). Public Policy Support For Smes: Lessons From International Experience. *Journal Of Small Business And Entrepreneurship Development*, 26(3), 289–302
- Suharto, S. (2023). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Peran Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Prosiding Senaspolhi*, 5(1).
- Sutoro Eko' Kusumawardhani, D. (2020). Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, Vol 2 No 1 Juni 2021, The Role Of Technology In Empowering Small And Medium Enterprises: A Case Study Of Indonesia. *Journal Of Business And Industrial Marketing*, 35(7), 1203–1215.
- Zachrawan,F. D., & Indartuti, E. (2022). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan UMKM Wisata Panci Di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 2(02), 77-82.
- Zuryati, A., & Barlan, Z. A. (2021). Hubungan Peran Pemimpin Dengan Keberhasilan Usaha Budidaya Ikan Hias. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(1), 134-149.

### **3. Sumber Lain-Lain**

- Penulis: Oleh Iftitah Nurul Laily 1 April 2022  
<https://katadata.co.id/berita/nasional/624689b762261/pengertianpenelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya>
- Penulis: Rahma putra kusdarmawan Nov 16 2023 <https://stekom.ac.id/berita/webinar-nasional-strategi-dan-implementasiakuntansi-umkm-di-era-digitalisasi>
- Penulis: Salsabila Nanda April 25, 2024 <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>

## LAMPIRAN

Wawancara bersama Pak Agung Murdianto sebagai Carik



Wawancara bersama Ibu Puji Lestari sebagai Pelaku UMKM



Wawancara bersama Ibu Muji Lestari sebagai Pelaku UMKM



Wawancara bersama Ibu Nurhidayati sebagai Pelaku UMKM

